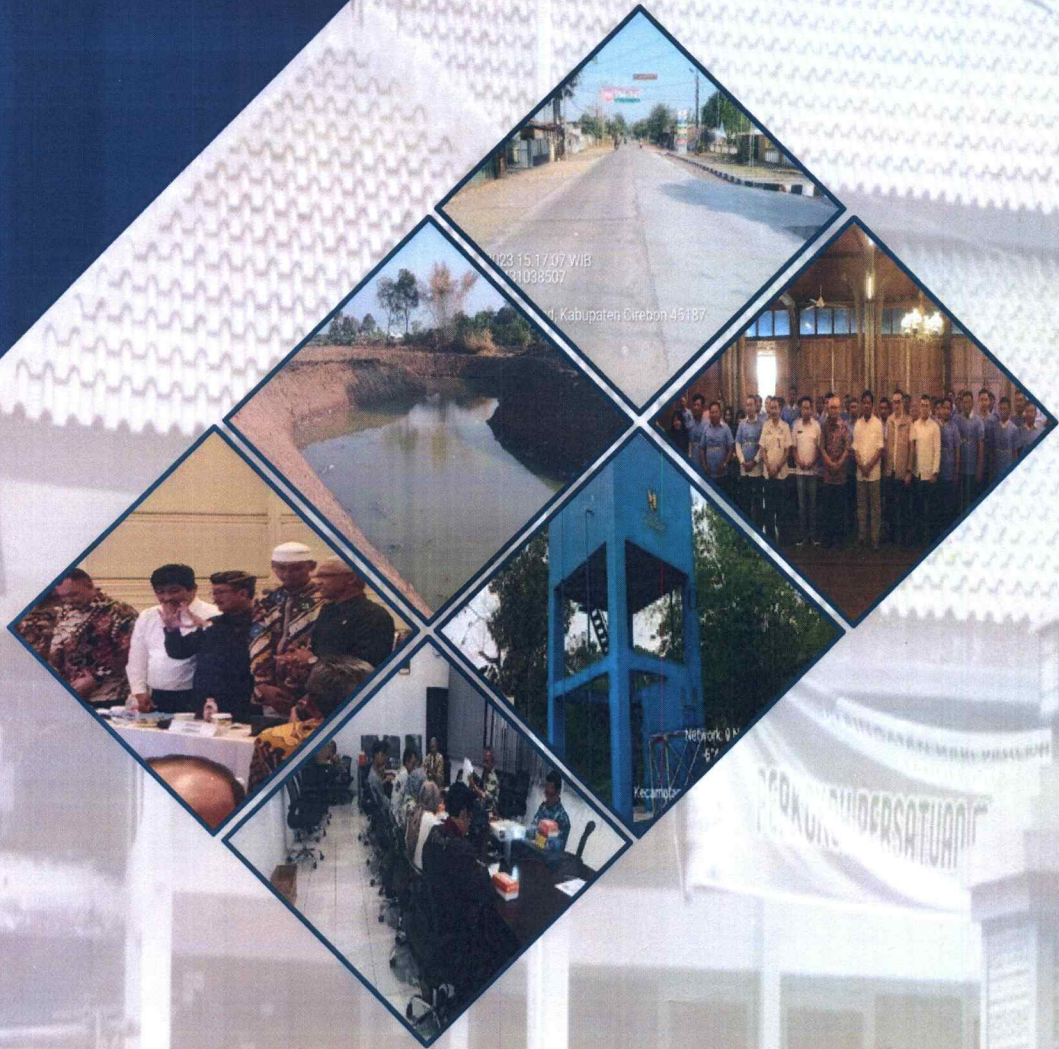


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DPUTR TAHUN 2023



KABUPATEN CIREBON
Jl. P. Cakrabuana No 100 TALUN

Kata Pengantar

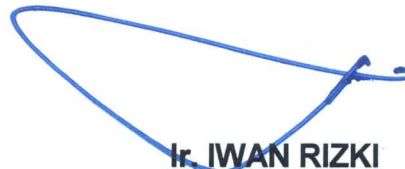
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi dalam setiap akhir anggaran harus menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah, baik dalam hal keberhasilan maupun juga kegagalan dalam pelaksanaan Program Kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, meliputi: penerimaan, pengalokasian, dan pelaksanaan serta pengamanannya.

Sebagai mata rantai dari rangkaian kegiatan manajemen, adanya evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, selain menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas pada akhir tahun anggaran, juga menjadi bahan masukan bagi organisasi, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan tahun mendatang.

Akhirnya, mudah-mudahan Laporan ini sedikit banyak akan bermanfaat khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Talun, Januari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian Kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan, berdasarkan kepada suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah melaksanakan fungsinya sebagai pembantu Kepala Daerah. Hal tersebut dapat mensukseskan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan 6 sasaran yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2024, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten
2. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang
4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan
6. Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan capaian sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023 mengelola anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 284.010.292.818,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.497.531.203,- atau 96,30 %, yang terbagi dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 101.172.756.318,-, dengan Realisasi sebesar Rp. 96.998.045.733,- atau 95,87% dan Belanja Modal sebesar Rp. 182.837.536.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 176.499.485.470,- atau 96,53 %. Dengan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	%	86	84,56	98,33
2	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	%	86,33	89	103,09
3	Ketaatan terhadap RTRW	%	27,28	22,22	81,45
4	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	%	85	85	100,00
5	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Point	73	73,7	100,96
6	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	%	63,72	46,73	73,34

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 Indikator Kinerja sasaran tersebut terdapat 4 Indikator Kinerja sasaran dengan hasil sangat Baik, 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil Baik dan 1 Indikator dengan hasil Sedang.dengan rata-rata capaian sasaran di tahun 2023 sebesar 92,67%

Demikian Ikhtisar Eksekutif LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang telah di capai serta menjadi masukan dalam pengambilan keputusan penetapan rencana dan program serta strategi yang harus dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon di tahun-tahun mendatang.

Talun, Januari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Pro Bisnis dan Struktur Organisasi	3
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Sumber Daya Manusia	5
F. Isu Strategis	5
G. Dasar Hukum	7
H. Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Organisasi	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
C. Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2023	16
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Pengukuran Pencapaian Kinerja	26
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Anggaran Tahun 2023	6
Tabel I.2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	7
Tabel II.1	Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun	10
Tabel II.2	Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun	11
Tabel II.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun	12
Tabel II.4	Matriks Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023	13
Tabel II.5	Matriks Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023	14
Tabel II.6	Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terkait langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	16
Tabel III.1	Capaian Indikator Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon	26
Tabel III.3	Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	27
Tabel III.4	Target dan Realisasi Sasaran 1	27
Tabel III.5	Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023	28
Tabel III.6	Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 1	28
Tabel III.7	Kinerja Program Sasaran 1	29
Tabel III.8	Kinerja Keuangan Sasaran 1	29
Tabel III.9	Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	32
Tabel III.10	Target dan Realisasi Sasaran 2	32
Tabel III.11	Rencana dan Realisasi Tanam 2022/2023	34
Tabel III.12	Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 2	39
Tabel III.13	Kinerja Program Sasaran 2	39
Tabel III.14	Kinerja Keuangan Sasaran 2	39
Tabel III.15	Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	41
Tabel III.16	Target dan Realisasi Sasaran 3	42
Tabel III.17	Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 3	42
Tabel III.18	Kinerja Program Sasaran 3	43
Tabel III.19	Kinerja Keuangan Sasaran 3	43
Tabel III.20	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 4	44
Tabel III.21	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4	45
Tabel III.22	Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 4	45
Tabel III.23	Kinerja Program Sasaran 4	46
Tabel III.24	Kinerja Keuangan Sasaran 4	46
Tabel III.25	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 5	47
Tabel III.26	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5	47

Tabel III.27	Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 5	48
Tabel III.28	Kinerja Program Sasaran 5	48
Tabel III.29	Kinerja Keuangan Sasaran 5	48
Tabel III.30	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 6	50
Tabel III.31	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6	52
Tabel III.32	Rekapitulasi SPAM	53
Tabel III.33	Layanan Pengelolaan Sampah	55
Tabel III.34	Cakupan akses air limbah domestik	56
Tabel III.36	Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 5	58
Tabel III.37	Kinerja Program Sasaran 6	59
Tabel III.38	Kinerja Keuangan Sasaran 6	60
Tabel III.39	Efisiensi dan Efektifitas per Sasaran	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Cascading Kinerja	2
Gambar I.2 Mandat Kinerja	3
Gambar I.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5
Gambar II.1 Instrumen Pendukung 1	21
Gambar II.2 Instrumen Pendukung 2	21
Gambar II.3 Instrumen Pendukung 3	22

DAFTAR FOTO

		Halaman
Foto III.1	Pembuatan Saluran Pada Ruas Jalan Tegalsari – Lemahtamba	30
Foto III.2	Pembuatan Trotoar Pada Ruas Jalan Ciperna – Warungasem	30
Foto III.3	Peningkatan Jalan Sindanglaut – Pabuaran	30
Foto III.4	Pemeliharaan Periodik Jalan Ciledug Lor - Bantarsari (Ciledug Tengah dan Ciledug Kulon)	31
Foto III.5	Peningkatan Jembatan Pada Ruas Jalan Cangkuang – Jemaras	31
Foto III.6	Rehabilitasi Jembatan pada Ruas Jalan Sidawangi - Matangaji (Huludayeuh Desa Matangaji)	31
Foto III.7	Pembangunan Senderan Sungai Ciparigi Kec. Dukupuntang	40
Foto III.8	Pemasangan Bronjong Kali Jamblang Desa Pesanggrahan Kec. Plumbon	40
Foto III.9	Normalisasi Kali Soka Kec. Plumbon	40
Foto III.10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ketos	41
Foto III.11	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Gegesik Kulon Kec. Gegesik	41
Foto III.12	Fasilitasi Persetujuan Subtansi RTRW	44
Foto III.13	Fasilitasi Persetujuan Subtansi RDTR	44
Foto III.14	Pelatihan Tenaga Terampil	46
Foto III.15	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	47
Foto III.16	Forum OPD	50
Foto III.17	Rapat Evaluasi	50
Foto III.18	Pembangunan SPAM	54
Foto III.19	Bangunan Penampungan Sampah	55
Foto III.20	Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik	57
Foto III.21	Layanan Bangunan Gedung	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

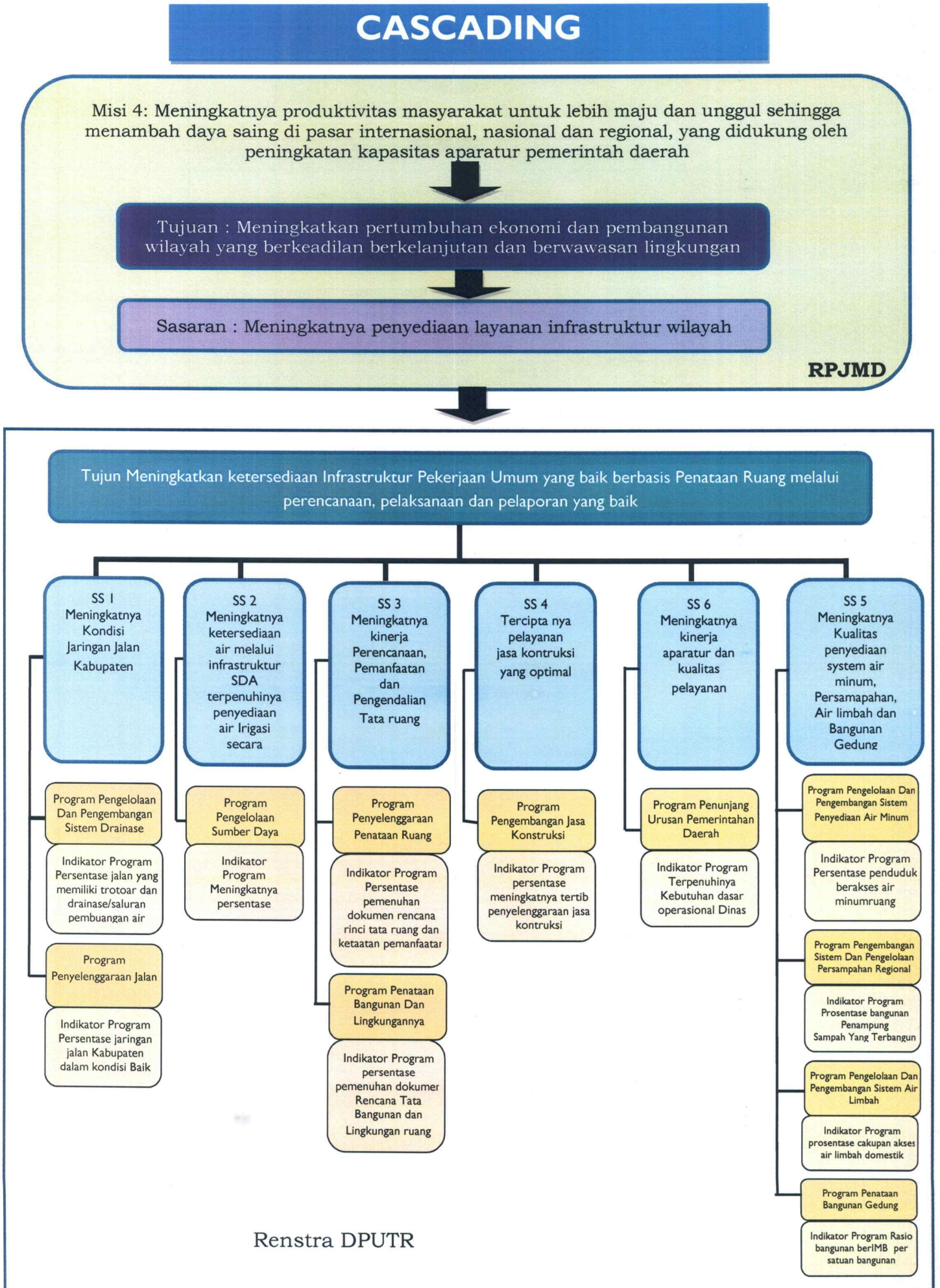
Laporan pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu hal penting dari hasil pelaksanaan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas dan mengetahui serta mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

B. Cascading kinerja sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema Kinerja tergambar pada halaman berikutnya:

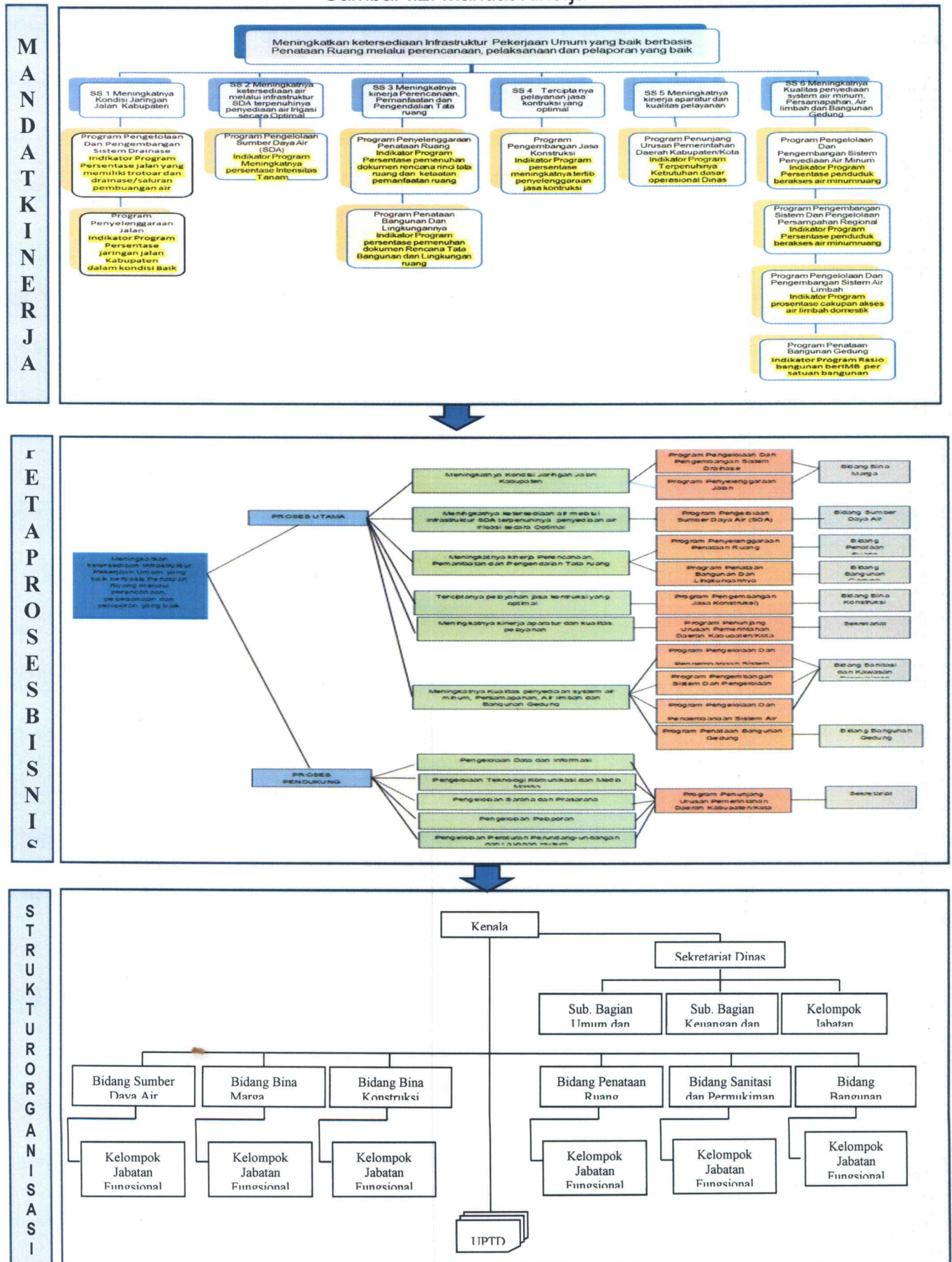
Gambar I.1 Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta pro bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2. Mandat Kinerja



D. Tugas,Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, maka ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon di ganti dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1).

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. Pengembangan sistem dan pengolahan persampahan regional;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. Pengembangan infrastruktur permukiman;
- h. Penataan bangunan gedung;
- i. Penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. Penyelenggaraan infrastruktur jalan;
- k. Pengembangan jasa konstruksi;
- l. Penyelenggaraan penataan ruang;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

E. Sumber Daya Manusia dan Sarana-Prasarana

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari ASN sebanyak 192 orang dan Non ASN sebanyak 308 Orang, dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel I.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Jabatan	Pegawai						Jumlah
		Kualifikasi						
		S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	0	1	0	0	0	0	1
B.	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	1	6	0	0	0	0	7
	2. Pengawas	1	20	1	0	0	0	22
	3. Pelaksana	0	54	7	77	5	3	146
C.	Fungsional	1	15	0	0	0	0	16
D.	NON ASN	0	99	17	182	6	4	308
	Jumlah	3	195	25	259	11	7	500

Berdasarkan pada data dan grafik diatas dapat terlihat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon perbandingan jumlah pegawai yang berlatar belakang Pendidikan Teknik masih dibawah jumlah pegawai yang berlatar belakang Pendidikan Umum, sehingga masih adanya kekurangan pegawai yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik, namun dari sisi kompetensi dengan pegawai yang ada dapat menjalankan tugas dengan baik dan kompeten.

Tabel I.1
Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Nilai Aset
1	Gedung Kantor	Unit	11	2.158.092.353,00
2	Tanah	m ²	8.085.248	216.870.234.724,50
3	Alat Berat	Unit	67	22.431.573.932,19
4	Alat Bengkel	Unit/Buah	100	468.900.707,66
5	Kendaraan (Roda 10, 6, 4, 3 dan 2)	Unit	153	7.617.064.850,88
6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tanggga	Unit/Buah	3.914	4.306.497.012,24
7	Alat Laboratorium	Unit	157	2.797.526.817,67

F. Isu Strategis

Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah mendesak, mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memberikan pelayanan penyediaan infrastruktur yang memadai. Apabila diidentifikasi dan dirumuskan ada beberapa isu strategis yang mempengaruhi pencapaian penyediaan infrastruktur yang memadai, antara lain sebagai berikut :

1. Mempertahankan/Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan;
2. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi);
3. Penyediaan dokumen rencana detail tata ruang;
4. Peningkatan pelayanan informasi jasa konstruksi;
5. Peningkatan fungsi Drainase Jalan dan penyediaan trotoar;
6. Pengendalian alih fungsi lahan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air;
8. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih;
9. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT);
10. Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
11. Belum efektifnya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Cirebon;
12. Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor dan kekumuhan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2023, selain memiliki Target Kinerja Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mempunyai tugas dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan lain-lain PAD yang sah, dapat terlihat pada tabel dihalaman berikutnya :

Tabel I.1
Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	514.799.182	514.799.182	-
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	514.799.182	514.799.182	-
4. 1. 02.	Retribusi Daerah	506.799.182	506.799.182	-
4. 1. 04.	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000	8.000.000	-
	PENDAPATAN	514.799.182	514.799.182	-
5.	BELANJA DAERAH	202.934.822.934	284.010.292.818	81.075.469.884
5. 1.	BELANJA OPERASI	63.069.692.234	101.172.756.318	38.103.064.084
5. 1. 01.	Belanja Pegawai	25.864.498.940	26.108.723.940	244.225.000
5. 1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	26.382.318.294	40.230.157.378	13.847.839.084
5. 1. 05.	Belanja Hibah	10.822.875.000	34.833.875.000	24.011.000.000
5. 2.	BELANJA MODAL	139.865.130.700	182.837.536.500	42.972.405.800
5. 2. 02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.447.141.000	9.375.747.000	(71.394.000,00)
5. 1. 03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.225.000.000	1.225.000.000
5. 1. 04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.417.989.700	172.236.789.500	41.818.799.800
	JUMLAH BELANJA	202.934.822.934	284.010.292.818	81.075.469.884
	SURPLUS/(DEFISIT)	(202.420.023.752)	(283.495.493.636)	(81.075.469.884)
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-

Adanya penambahan anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp. 81.075.469.884, yang penambahan tersebut bersumber dari DAK Fisik Bidang Air Minum sebesar Rp. 11.392.745.000,-, DAK Fisik Bidang Sanitasi sebesar Rp. 12.937.256.500,-, DAK Fisik Bidang Irigasi sebesar Rp. 16.292.799.800,-, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 4.800.000.000,-, yang proses penambahan anggaran pada perubahan penjabaran atau parsial serta pada perubahan anggaran mendapatkan alokasi tambahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 30.052.668.584,-, merupakan untuk mendukung peningkatan capaian kinerja Pembangunan yang menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel I.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Membuat Diagram Crosscutting	Dinas Pekerjaan Umum telah Menyusun atau membuat Diagram Crosscutting
2.	Dalam Pengukuran kinerja dan pengumpulan ditambahkan lampiran tentang defines operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Telah melampirkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
3	Dokumen laporan kinerja dituangkan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Banchmark Kinerja)	Telah menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level atasnya (Provinsi)
4.	Melibatkan SDM yang telah mengikuti Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan LAKIP dengan melampirkan sertifikat Pelatihan/Sosialisasi	Telah melibatkan SDM yang memiliki sertifikat Bimtek penyusunan LAKIP

G. Dasar Hukum

Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon ;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang: Gambaran Singkat Organisasi, Isu Strategis Yang Berpengaruh, Tugas Pokok dan Fungsi, Dasar Hukum, Sistematika Penyajian

Bab II . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Rencana Statejik Organisasi yang terdiri dari Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Cara mencapai tujuan dan sasaran. Pada Bab juga menjabarkan mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang berisi Sasaran, Indikator Sasaran dan Program-program 2022.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Kerangka Pengukuran Kinerja yang menjelaskan mengenai Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di tahun 2021 - 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon disusun dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2024 dengan penetapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 yang mencakup Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2023.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang *Tujuan*

Tujuan dan Sasaran dari unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan penjabaran atau mengacau dari pernyataan Misi Pembangunan Daerah yang sudah dirumuskan, dengan mempertimbangkan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, adapun misi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah :

“Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik ”

Tabel II.1
Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	-	63,84	73,67	79,48	80,90	

Sasaran

Sasaran (Objectives) : merupakan penjabaran dari Tujuan, yaitu apa yang akan dicapai pada jangka pendek (tahunan, semesteran atau triwulanan), berupa satuan-satuan pelaksanaan tugas/kegiatan, menggambarkan target-target yang akan dicapai, dan bersifat dapat diukur secara kuantitatif dengan jelas dan mudah. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

Tabel II.2
Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun				Kondisi Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam	85,33%	85,67%	86,00%	86,33%	86,67%	86,67%
2.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	83,32%	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %
3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	5,56%	11,11 %	16,67 %	27,78 %	33,33 %	33,33 %
4.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	40 %	55%	70%	85%	55%	55%
5.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	-	37,65%	63,18%	63,72%	64,01%	64,01%
6.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	62,67	63,32	71,5	73	75	75

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat sehingga semua program, kegiatan dan Sub. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, Strategi yang telah dirumuskan, dapat terlihat pada halaman berikutnya:

Tabel II.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Jembatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Secara Rutin ataupun Periodik/Berkala 3. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan 4. Peningkatan data base kondisi jalan dan jembatan 5. Peningkatan pendataan Rumija dan damija 6. Penambahan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi 7. Pemeliharaan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
2.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bangunan Jaringan Irigasi (Pintu Air, Bendung dan lain lain) 2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Peningkatan Peran Komisi Irigasi
		Peningkatan Upaya Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Bangunan Saluran 2. Pemeliharaan Bangunan Saluran 3. Pembangunan Penampung Air 4. Pemeliharaan Saluran melalui Kurasan dan Normalisasi
3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Meningkatkan aturan perencanaan dan pengendalian pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rencana Detail 2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.	Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Kontruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang jasa kontruksi 2. Penguatan system informasi jasa kontruksi 3. Pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraan jasa kontruksi
5.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Layanan penyediaan Infrstruktur Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, persampahan, dan Bangunan Gedung 2. Peningkatan Data Base 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penyusunan Data Base 2. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Perpipaan kawasan perkotaan dan perdesaan 3. Supervisi Pembangunan, Peningktana, Perluasan dan Perbaikan SPAM dan Sabitasi 4. Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem pengelolaan skala perkotaan dan permukiman 5. Pembangunan TPA/TPST/TPS-3 dan TPS 6. Penguatan Aturan bangunan gedung 7. Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan serta pendataan bangunan gedung
6.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Sarana dan Parasana Aparatur 3. Penyediaan kebutuhan Rutin aparatur 4. Penyediaan dokumen pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan kinerja atau kesepakatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, penetapan Kinerja sebagaimana Berikut :

Tabel II.4
Matriks Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target Kinerja
1.	Tujuan Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif persentase Kondisi Jalan Mantap, Kondisi Jaringan Irogasi Baik dan Persentase kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman}}{3}$	Prosen	79,48
1.1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Prosen	86
1.2.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300} \times 100$	Prosen	86,33
1.3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tataruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah Kebijakan pembangunan yang ada pada RTRW}} \times 100$	Prosen	27,28
1.4.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi}}{\text{Jumlah Layanan yang direncanakan}} \times 100$	Prosen	85
1.5.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat	Point	73
1.6.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah kumulatif capaian Prosentase Penduduk berakses Air Minum, Prosentase Bangunan Penampungan Sampah yang terbangun, Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi dan Rasio bangunan ber IMB Persatuan Bangunan}}{4}$	Prosen	63,72

Keterangan

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai Berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.769.554.700
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	100.987.576.500
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	30.404.973.900
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	86.614.000
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	618.328.000
6.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	439.696.000

No.	Program	Anggaran (Rp.)
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.350.025.734
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	791.611.200
9.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.993.184.500
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	525.884.200
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	11.967.374.200
JUMLAH		202.934.822.934

2. Data kinerja tersedia pada Triwulan IV akhir

Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja, hal ini dikarenakan adanya penambahan alokasi anggaran baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi dan APBD untuk meningkatkan ketercapaian kinerja serta penanganan – penanganan Infrastruktur yang bersifat sangat penting untuk dilakukan tindakan yang menjadi Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2023, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel II.5
Matriks Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target Kinerja
1.	Tujuan Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif persentase Kondisi Jalan Mantap, Kondisi Jaringan Irogasi Baik dan Persentase kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman}}{3}$	Prosen	79,48
1.1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Prosen	86
1.2.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300} \times 100$	Prosen	86,33
1.3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tataruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah Kebijakan pembangunan yang ada pada RTRW}} \times 100$	Prosen	27,28
1.4.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi}}{\text{Jumlah Layanan yang direncanakan}} \times 100$	Prosen	85
1.5.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat	Point	73
1.6.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah kumulatif capaian Persentase Penduduk berakses Air Minum, Persentase Bangunan Penampungan Sampah yang terbangun, Persentase Rumah Tinggal bersanitasi dan Rasio bangunan ber IMB Persatuan Bangunan}}{4}$	Prosen	63,72

Keterangan

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai Berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.769.554.700	14.434.554.700
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	100.987.576.500	119.544.576.500
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	30.404.973.900	54.838.773.700
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	86.614.000	86.614.000
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	618.328.000	968.328.000
6.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	439.696.000	439.696.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.350.025.734	39.941.848.318
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	791.611.200	12.184.356.200
9.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.993.184.500	11.393.184.500
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	525.884.200	15.471.140.700
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	11.967.374.200	14.707.220.200
JUMLAH		202.934.822.934	284.010.292.818

2. Data kinerja tersedia pada Triwulan IV akhir
Keterangan Tambahan

Indikator Kinerja dan Target Kinerja tidak berubah, tetapi alokasi anggaran bertambah 39,95 %, adanya penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi dan APBD untuk meningkatkan ketercapaian kinerja serta penanganan – penanganan Infrastruktur yang bersifat sangat penting untuk dilakukan tindakan.

C. Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2023, sebagaimana di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.6
Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terkait langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sssudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
1. Sasaran Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten		112.757.131.200	133.979.131.200	21.222.000.000
	1.1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.769.554.700	14.434.554.700	2.665.000.000
	1.1.1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.769.554.700	14.434.554.700	2.665.000.000
	1.1.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	98.142.900	148.142.900	50.000.000
	1.1.1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	11.671.411.800	14.286.411.800	2.615.000.000
	1.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.987.576.500	119.544.576.500	18.557.000.000
	1.2.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100.987.576.500	119.544.576.500	18.557.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sssudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	1.2.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	737.364.600	1.037.364.600	300.000.000
	1.2.1.2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	377.986.600	377.986.600	-
	1.2.1.3. Rekonstruksi Jalan	84.721.084.100	93.917.084.100	9.196.000.000
	1.2.1.4. Pemeliharaan Berkala Jalan	10.718.721.000	16.233.721.000	5.515.000.000
	1.2.1.5. Pemeliharaan Rutin Jalan	2.823.219.000	5.868.219.000	3.045.000.000
	1.2.1.6. Penggantian Jembatan	1.000.000.000	1.501.000.000	501.000.000
	1.2.1.7. Rehabilitasi Jembatan	609.201.200	609.201.200	-
2. Sasaran Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA		30.404.973.900	54.838.773.700	24.433.799.800
	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.404.973.900	54.838.773.700	24.433.799.800
	2.1.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.578.435.500	26.152.435.500	6.574.000.000
	2.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	147.638.800	362.638.800	215.000.000
	2.1.1.2. Pembangunan Tanggul Sungai	12.759.604.500	16.902.604.500	4.143.000.000
	2.1.1.3. Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.310.965.400	2.840.965.400	1.530.000.000
	2.1.1.4. Normalisasi/Restorasi Sungai	5.360.226.800	6.046.226.800	686.000.000
	2.1.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.826.538.400	28.686.338.200	17.859.799.800
	2.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	107.834.000	277.834.000	170.000.000
	2.1.2.2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5.490.757.400	22.407.557.200	16.916.799.800
	2.1.2.3. Rehabilitasi Bendung Irigasi	99.442.300	99.442.300	-
	2.1.2.4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.128.504.700	5.901.504.700	773.000.000
3. Sasaran Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang		704.942.000	1.054.942.000	350.000.000
	3.1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	86.614.000	86.614.000	-
	3.1.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	86.614.000	86.614.000	-
	3.1.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	86.614.000	86.614.000	-
	3.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	618.328.000	968.328.000	350.000.000
	3.2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten/Kota	279.404.000	629.404.000	350.000.000
	3.2.1.1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	279.404.000	629.404.000	350.000.000
	3.2.2. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	179.380.000	179.380.000	-
	3.2.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	179.380.000	179.380.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sssudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	3.2.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.544.000	159.544.000	-
	3.2.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	159.544.000	159.544.000	-
4. Sasaran Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal		439.696.000	439.696.000	-
	4.1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	439.696.000	439.696.000	-
	4.1.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	326.711.800	326.711.800	-
	4.1.1.1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	159.817.300	159.817.300	-
	4.1.1.2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	166.894.500	166.894.500	-
	4.1.2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	112.984.200	112.984.200	-
	4.1.2.1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	112.984.200	112.984.200	-
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan		39.350.025.734	39.941.848.318	591.822.584
	5.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.350.025.734	39.941.848.318	591.822.584
	5.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.015.900	102.015.900	-
	5.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.515.900	49.515.900	-
	5.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.500.000	52.500.000	-
	5.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.911.112.340	26.158.937.340	247.825.000
	5.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.860.898.940	26.108.723.940	247.825.000
	5.1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.999.800	-
	5.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.213.600	45.213.600	-
	5.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.044.000	200.044.000	-
	5.1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.044.000	200.044.000	-
	5.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.283.900	700.327.400	165.043.500
	5.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.300	9.999.300	-
	5.1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.800	24.729.800	14.730.000
	5.1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.900	79.999.900	-
	5.1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.760.000	95.760.000	-
	5.1.4.5. Penyediaan Bahan/Material	151.241.800	151.241.800	-
	5.1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	-
	5.1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.287.500	298.601.000	150.313.500
	5.1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.995.600	34.995.600	-
	5.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.447.141.000	9.321.036.000	-126.105.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sssudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	5.1.5.1. Pengadaan Alat Besar	9.264.084.000	9.264.084.000	-
	5.1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.057.000	56.952.000	-126.105.000
	5.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.387.344	679.386.928	149.999.584
	5.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.387.344	679.386.928	149.999.584
	5.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.625.041.250	2.780.100.750	155.059.500
	5.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	767.983.500	767.983.500	-
	5.1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.984.100	67.984.100	-
	5.1.7.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	560.915.100	675.993.600	115.078.500
	5.1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.961.650	175.961.650	-
	5.1.7.5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62.790.000	62.790.000	-
	5.1.7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	924.746.900	964.727.900	39.981.000
	5.1.7.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.660.000	64.660.000	-
	6.Sasaran Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	19.278.054.100	53.755.901.600	34.477.847.500
	6.1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	791.611.200	12.184.356.200	11.392.745.000
	6.1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	791.611.200	12.184.356.200	11.392.745.000
	6.1.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	143.529.200	143.529.200	-
	6.1.1.2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	148.541.300	148.541.300	-
	6.1.1.3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	11.392.745.000	11.392.745.000
	6.1.1.4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	299.540.700	299.540.700	-
	6.1.1.5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200.000.000	200.000.000	-
	6.2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.993.184.500	11.393.184.500	5.400.000.000
	6.2.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5.993.184.500	11.393.184.500	5.400.000.000
	6.2.1.1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5.993.184.500	11.393.184.500	5.400.000.000
	6.3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	525.884.200	15.471.140.700	14.945.256.500
	6.3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	525.884.200	15.471.140.700	4.945.256.500
	6.3.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.031.300	56.031.300	-

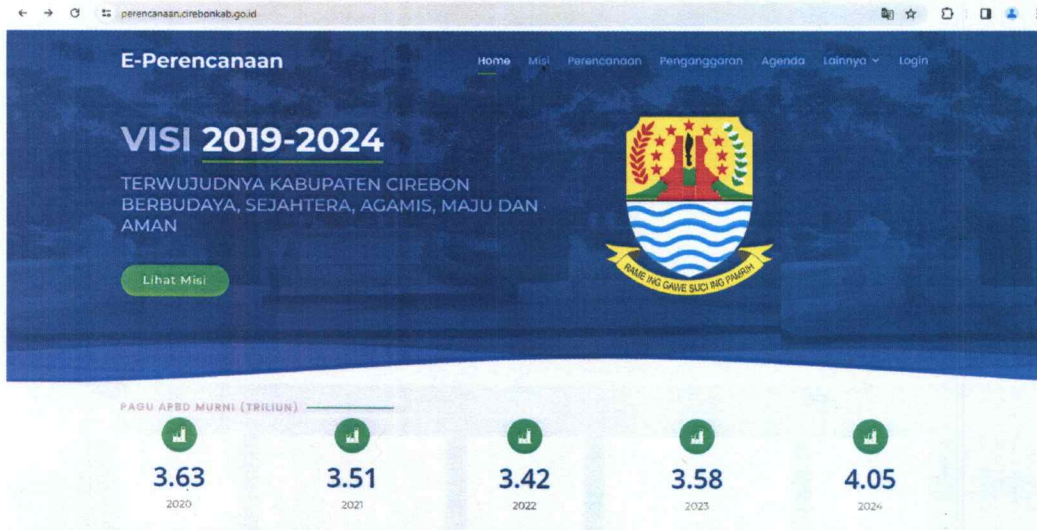
Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sssudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
6.3.1.2.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	469.852.900	15.415.109.400	14.945.256.500
6.4.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.967.374.200	14.707.220.200	2.739.846.000
6.4.1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.967.374.200	14.707.220.200	2.739.846.000
6.4.1.1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	545.697.000	585.543.000	39.846.000
6.4.1.2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	845.000.000	570.000.000
6.4.1.3.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	56.908.600	56.908.600	-
6.4.1.4.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	85.074.600	85.074.600	-
6.4.1.5.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.004.694.000	13.134.694.000	2.130.000.000
Jumlah		202.934.822.934	284.010.292.818	81.075.469.884

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. E-Perencanaan (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

E-Perencanaan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan, mengawal proses perencanaan serta merespon aspirasi Masyarakat dan awal penyusunan anggaran . Tampilan E-Perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.1 Instrumen Pendukung 1



2. Simonek (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon)

Instrumen ini mendukung dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan memonitor pencapaian kinerja dan realisasi anggaran bagi setiap perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, yang pelaksanaan pelaporannya dilakukan oleh setiap perangkat daerah setiap bulan dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sebagai base data dalam evaluasi yang dilakukan per triwulan. Tampilan Simonek dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar II.2 Instrumen Pendukung 2

The screenshot shows the 'SIMONEK' website interface. The main content is a table titled 'Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Renja SKPD 2020'. The table has columns for 'No', 'Nama SKPD', 'Jml. Prg', 'Jml. Keg', 'Anggaran' (with sub-columns for 'Pagu', 'Serapan', and 'Rasio').

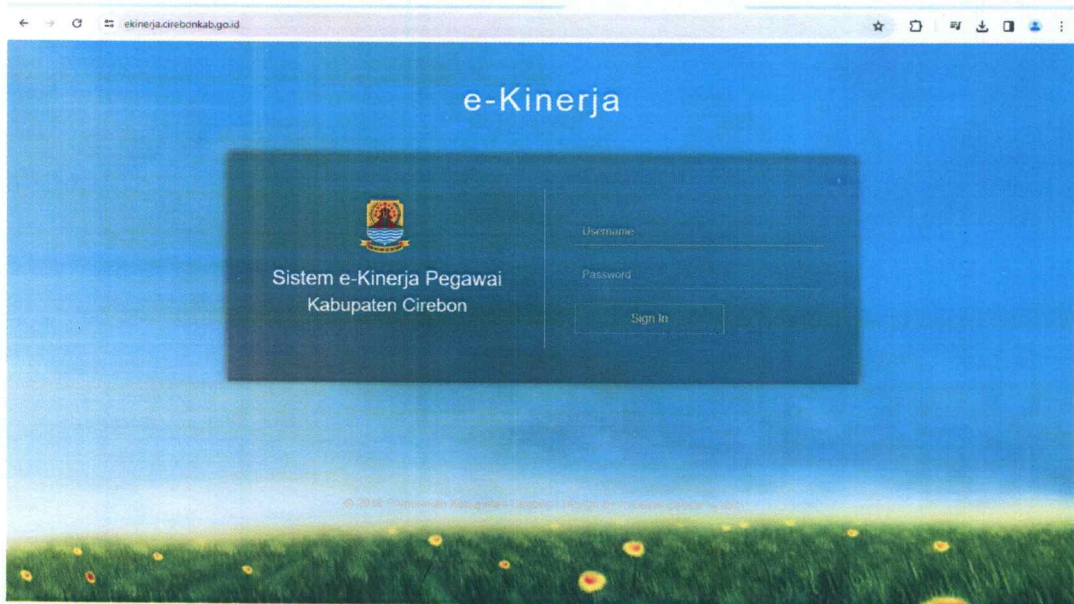
No	Nama SKPD	Jml. Prg	Jml. Keg	Anggaran		
				Pagu	Serapan	Rasio
1	DINAS PENDIDIKAN	12	123	292.743.481.442,00	52.116.230.772,00	17,80 %
2	DINAS KESEHATAN	22	199	388.705.459.988,00	235.014.459.474,00	60,46 %
3	DINAS PERKURAHAN, KAWASAN PERKURAHAN DAN PERTANAHAN	18	84	128.223.891.218,00	102.258.128.487,00	79,76 %
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	15	25	33.958.087.300,00	25.550.957.000,00	75,26 %
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10	34	8.508.581.100,00	7.397.576.838,00	86,93 %
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	5	29	1.116.217.200,00	8.228.577.878,00	73,81 %
7	DINAS SOSIAL	12	50	8.598.104.890,00	4.573.846.478,00	53,19 %
8	DINAS KEKAWIHAN PANGAN	5	20	4.023.048.188,00	3.748.266.411,00	93,17 %
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	20	35.216.854.100,00	29.986.614.498,00	85,16 %
10	DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN SIPIL	10	43	8.157.592.700,00	4.978.934.200,00	60,91 %
11	DINAS PEMBENDAHARAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	42	2.468.481.204,00	1.796.649.477,00	72,75 %
12	DINAS PENDEKATAN PENCUCUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBENDAHARAAN PEREMPUAN DAN PERLUNGSIAN ANAK	18	55	13.053.412.200,00	12.015.617.700,00	91,99 %
13	DINAS PERKUBURAN	11	45	54.022.918.900,00	45.158.154.384,00	83,58 %
14	DINAS KEMERDEKAAN DAN INFORMASI	10	20	10.545.830.100,00	7.510.882.718,00	71,23 %
15	DINAS KOPERASI, USAHA SECI, DAN HEMERDESAH	10	40	7.291.735.800,00	2.764.271.799,00	37,91 %
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU	11	28	2.932.732.200,00	2.370.754.218,00	80,83 %
17	DINAS KEBUDIRYAIAN, PERINDUSTRIAN, KEBERUSAHAAN DAN OLAH RAGA	10	40	7.888.984.200,00	8.390.388.941,00	106,36 %
18	DINAS KEKAWIHAN DAN KEPUSATKAWIHAN	9	45	1.308.008.144,00	1.208.208.024,00	92,36 %
19	DINAS KEKAWIHAN DAN PERKAWIHAN	11	48	3.028.704.987,00	2.318.218.212,00	76,57 %
20	DINAS PERTAHANAN	11	40	8.231.184.800,00	9.780.953.213,00	118,81 %
21	DINAS PERDAKARAN DAN PERINDUSTRIAN	14	41	8.711.084.900,00	4.897.228.222,00	56,21 %
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN	17	70	8.040.101.700,00	8.148.768.900,00	101,35 %

3. e-Kinerja Pegawai Kabupaten Cirebon

Instrumen ini mendukung dalam memonitoring pencapaian kinerja sasaran dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Cirebon pada setiap bulannya.

Tampilan Simonek dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar II.3 Instrumen Pendukung 3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon selaku pengembal amanah masyarakat Kabupaten Cirebon telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Cirebon.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam

proses penyusunan kebijakan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

- (1) data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi;
- (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat efisiensi dan efektifitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi data, yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak akan diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

- 1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
- 2) Tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2024, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran Rencana Strategik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Target Rencana Tahun } t} \times 100$$

Rumus 2:

$$\text{Persentase Peningkatan/ Penurunan capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Thn } t - \text{Realisasi Thn } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 3:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya} = \frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 4:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah} = \frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } n} \times 100$$

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2.	76% ≤ 90%	Baik
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

B. Pengukuran Pencapaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tingkat capaian kinerja tujuan dan masing-masing Indikator kinerja Sasaran tersebut diuraikan dalam tabel pada halaman berikutnya :

Tabel III.1
Capaian Indikator Tujuan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Tahun 2023

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2022	2023		Capaian	Kriteria Kinerja	Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	%	86,53	79,48	87,79	110,46	Sangat Baik	80,90

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Sasatan Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023		Capaian %	Kategori Capaian	Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1.	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	%	84,12	86	84,56	98,33	Sangat Baik	87
2.	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	%	88	86,33	89	103,09	Sangat Baik	86,67
3	Ketaatan terhadap RTRW	%	16,67	27,28	22,22	81,45	Baik	33,33
4	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	%	70	85	85	100,00	Sangat Baik	100
5	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Point	68,92	73	73,7	100,96	Sangat Baik	75
6	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	%	45,40	63,72	47,72	74,42	Sedang	64,01

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

1.1. Sasaran 1 :

Kinerja sasaran Meningkatkan Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten diukur dengan indikator Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap), indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Pengukuran
1.1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$

Tabel III.4
Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	Prosen	84,12	86	84,56	98,33	87	97,20

$$\frac{710,06 + 338,78 = 1.048,84}{1.240,30} \times 100 = 84,56\%$$

Untuk meningkatkan kondisi Jaringan Jalan, sangat diperlukan penanganan jalan melalui Rekonstruksi Jalan, Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan serta Penanganan Jembatan berupa Pengantian Jembatan, Rehabilitasi Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan, dalam rangka pemenuhan peningkatan kondisi jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon di tahun 2023 telah melakukan Rekonstruksi Jalan sepanjang 48,79 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Sepanjang 18,12 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 180,71 Km, Penggantian Jembatan sepanjang 14 meter (3 Jembatan) dan Rehabilitasi Jembatan sepanjang 9 Meter (2 Jembatan), selain penanganan terhadap badan jalan di tahun 2023 untuk menjaga kondisi jalan telah melakukan pembangunan bangunan pelengkap jalan melalui pembangunan saluran jalan kabupaten, pembangunan tembok senderan dan trotoar sepanjang 7.319 Meter, pada akhir tahun 2023 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.048,84 km atau 84,56 %, Kondisi jalan mantap tersebut belum melampaui target yang dicapai melalui program Penyelenggaraan Jalan, Kondisi Jalan Kabupaten akhir tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1.	Mantap	1.048,84	84,56	Baik	710,06	57,25
				Sedang	338,78	27,31
2.	Tidak Mantap	191,47	15,44	Rusak Ringan	99,12	7,99
				Rusak Berat	92,35	7,45

Tabel III.6
Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 1

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah Daerah melalui program prioritas Pembangunan Daerah dalam hal infrastruktur Jalan Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Dearah 	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan jalan belum berbanding lurus dengan kebutuhan penyelesaian kerusakan jalan Sebagian besar jaringan jalan belum memiliki drainase 	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan jalan dilakukan secara berkelanjutan melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin serta Pembangunan pelengkap jalan peningkatan struktur jalan pada daerah-daerah yang rentan mengalami penurunan kualitas jalan

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran 1 dijabarkan ke dalam Capaian Program/Kegiatan dalam tabel berikut :

Tabel III.7
Kinerja Program Sasaran 1

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	Prosen	5,48	4,57	5,98	130,55	4,92	121,54
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	Prosen	55,71	59	57,25	97,03	60,00	95,42

Tabel III.8
Kinerja Keuangan Sasaran 1

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	14.434.554.700	14.123.906.780	97,85
I.1.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.434.554.700	14.123.906.780	97,85
I.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	148.142.900	138.987.880	93,82
I.1.2.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	14.286.411.800	13.984.918.900	97,89
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	119.544.576.500	116.564.777.545	97,51
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	119.544.576.500	116.564.777.545	97,51

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
2.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.037.364.600	998.283.700	96,23
2.1.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	377.986.600	358.070.760	94,73
2.1.5	Rekonstruksi Jalan	93.917.084.100	91.447.312.313	97,37
2.1.6	Pemeliharaan Berkala Jalan	16.233.721.000	15.944.855.360	98,22
2.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.868.219.000	5.751.197.850	98,01
2.1.8	Penggantian Jembatan	1.501.000.000	1.462.233.562	97,42
2.1.9	Rehabilitasi Jembatan	609.201.200	602.824.000	98,95
Jumlah		133.979.131.200	130.688.684.325	97,54

Foto III.1 Pembuatan Saluran Pada Ruas Jalan Tegalsari – Lemahtamba



Foto III.2 Pembuatan Trotoar Pada Ruas Jalan Ciperna - Warungasem



Foto III.3 Peningkatan Jalan Sindanglaut - Pabuaran

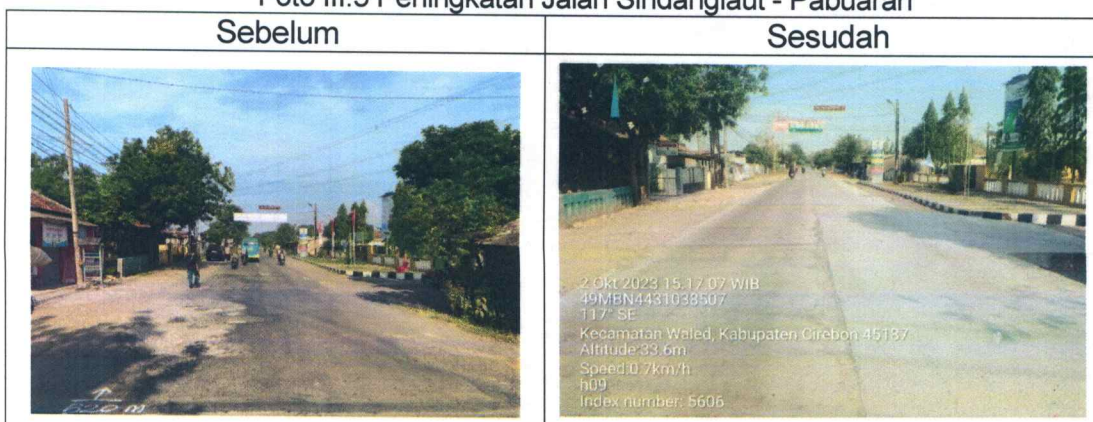


Foto III.4 Pemeliharaan Periodik Jalan Ciledug Lor - Bantarsari (Ciledug Tengah dan Ciledug Kulon)



Foto III.5 Peningkatan Jembatan Pada Ruas Jalan Canguang - Jemaras



Foto III.6 Rehabilitasi Jembatan pada Ruas Jalan Sidawangi - Matangaji (Huludayeuh Desa Matangaji)



1.2. Sasaran 2 :

Kinerja sasaran Meningkatnya persentase Intensitas Tanam diukur dengan indikator Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.9
Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Pengukuran
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300} \times 100$

Sumber data diolah dengan hasil perhitungan data realisasi tanam I, II dan III pada tahun N dibagi dengan target realisasi tanam 300 dikali 100, target sasaran ini ditahun 2023 yaitu 86,33%, indikator ini dengan realisasi 89 %, sehingga perhitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Target dan Realisasi Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023		Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi			
1	Sasaran Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam	Prosen	88	86,33	89	103,09	86,67	102,69

$$\frac{267\%}{300\%} \times 100 = 89\%$$

Untuk meningkatkan intensitas tanam, sangat diperlukan penanganan sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui Pembangunan, Rehabilitasi Tanggul Sungai dan Normalisasi/Restorasi Sungai serta penanganan jaringan irigasi melalui peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi bendung irigasi, operasi pemeliharaan jaringan irigasi dan tata pelaksanaan pengaturan air , dalam rangka pemenuhan meningkatkan intensitas tanam, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon di tahun 2023 telah melakukan Pembangunan Tanggul Sungai sepanjang 7,68 Km, Rehabilitasi Tanggul Sungai Sepanjang 0,54 Km, Normalisasi/Restorasi Sungai sepanjang 26,76 Km, Peningkatan Jaringan Irigasi sepanjang 10,24 Km, Rehabilitasi Bendung Irigasi 1 Bendung dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 35 Km, pada akhir tahun 2023 diketahui realisasi intensitas taman sebesar 89%, Realisasi Intensitam tanam akhir tahun 2023 disajikan dalam tabel pada halaman berikutnya :

Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Tanam 2022/2023

No	Daerah Irigasi	Luas Fungsional (Ha)	Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Ket							
			MT. I Tahun 2022/2023			MT. II Tahun 2022/2023			MT. III Tahun 2022/2023			MT. III Tahun 2022/2023										
			Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26		
	Kewenangan Pusat																					
1	Rentang	20.567	20.567	-	-	20.567	-	-	20.567	-	-	20.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ciwaringin	1.092	1.092	-	-	1.092	-	-	1.092	-	-	1.092	-	-	439	-	-	-	-	-	439	-
3	Seuseupan	3.822	2.008	1.500	314	2.068	1.503	251	1.281	1.557	984	1.281	1.557	984	-	-	-	-	1.557	-	-	-
4	Cikeusik	6.815	4.261	267	2.287	1.837	399	4.579	3.945	230	2.570	2.481	380	3.921	-	-	-	-	380	4.139	-	-
	Jumlah	32.296	27.928	1.767	2.601	25.564	1.902	4.830	26.885	1.787	3.554	24.933	1.937	4.905	-	-	5.331	-	1.937	4.578	-	-
	Kewenangan Provinsi																					
1	Jamblang	2.141	2.141	-	-	2.141	-	-	2.141	-	-	2.141	-	-	292	-	1.174	-	-	-	-	-
2	Walahar	1.286	1.286	-	-	1.286	-	-	1.286	-	-	1.286	-	5	-	-	594	-	-	-	-	-
3	Cipager	855	855	-	-	855	-	-	599	-	256	855	-	-	-	-	362	-	-	-	-	-
4	Setupatok	1.365	1.222	143	-	1.365	-	-	899	101	365	1.365	-	-	-	-	237	-	-	-	-	-
5	Ambit	1.543	781	690	72	781	690	72	611	685	247	611	685	247	-	-	-	-	690	-	-	-
6	Cibacang	259	259	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Cipurut	134	126	-	8	123	-	11	111	-	23	123	-	11	-	-	53	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26
8	Jawa	111	99	-	12	99	-	12	67		41	99		12			46			
9	Mungkal Gajah	27	19	-	8	19	-	8	17		10	19		8			25			
10	Katiga	662	632	14	16	629	10	23	390		234	629	10	23			138			
11	Panisi Lebak	318	318	-	-	318	-	-	223		95	318					54			
12	Cisamaya	63	63	-	-	63	-	-	50		13	63					30			
13	Cirongkob	64	64	-	-	64	-	-	64			64					64			
	Jumlah	8.328	7.865	847	116	8.002	700	126	6.458	786	1.284	7.573	695	301	297	-	2.777	-	690	-
	Kewenangan Kabupaten																			
1	Jatisawit	687	687	-	-	687	-	-	241			640								
2	Cipaigi	438	432	6	-	438	-	-	350	5	82	438					220			220
3	Keputon	399	399	-	-	399	-	-	232	20	147	399					78			78
4	Soka	258	249	9	-	258	-	-	214	12	32	258					78			78
5	Rajadana	135	135	-	-	135	-	-	94	15	26	135					53			53
6	Waduk Sedong	168	168	-	-	168	-	-	118		49	168					47			47
7	Panongan	952	786	149	17	774	173	5	383		401	774	173	5			488			
8	Agung	711	403	260	48	402	279	30	402	1	44	379	302	30	155		44			
9	Kecepat	477	425	-	52	423	18	36	424		53	423	18	36	2		258			
10	Ciwado	760	600	104	56	610	110	40	451		211	600	138	22	21		456			
11	Cangkuang	806	390	301	115	390	301	115	341	301	164	99	301	164					301	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26
12	Telaga Remis	90	90	-	-	90	-	-	90			90			47					
13	Tonjong	107	107	-	-	107	-	-	107			107			101					
14	Ciwedus	159	144	15	-	144	15	-	144			144		15	56					
15	Sigong	99	99	-	-	99	-	-	99			99			74		25			
16	Sigebang	167	167	-	-	167	-	-	167			167			57		49			
17	Ciliwotan	64	64	-	-	64	-	-	64			64			17		47			
18	Dukuh Suwung	93	93	-	-	93	-	-	60		44	63		30			44			
19	Gunung Breg	8	8	-	-	8	-	-	8			8					8			8
20	Pilang	15	15	-	-	15	-	-	15			15					15			15
21	Cibinuang	23	23	-	-	23	-	-	23			23					23			23
22	Cigobang	173	173	-	-	173	-	-	173			173					173			173
23	Soka Udik	152	125	27	-	152	-	-	59		54	152					123			123
24	Situan I	150	123	27	-	150	-	-	66		31	150					123			
25	Situan II	158	158	-	-	158	-	-	107			158								
26	Cibuluh	248	248	-	-	248	-	-	178		60	248					225			
27	Cirengas	237	237	-	-	237	-	-	153		84	237					231			
28	Suba	218	218	-	-	218	-	-	218			218					218			
29	Dalem	96	96	-	-	96	-	-	60		36	96					25			
30	Loa Kudang	113	94	-	19	113	-	-	65		10	113					24			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26
31	Kenanga	51	51	-	-	51	-	-	28		23	51					24			
32	Gedongan	15	15	-	-	15	-	-	10		5	15					5			
33	Loa	24	24	-	-	24	-	-	14		10	24					12			
34	Tegal	64	64	-	-	64	-	-	34		15	64					12			
35	Harikukun	23	23	-	-	23	-	-	23			23					10			
36	Jengkol	27	27	-	-	27	-	-	23		4	27								
37	Mandalangit	46	46	-	-	46	-	-	26		20	46					20			20
38	Tegal Pucuk	36	36	-	-	36	-	-	26		10	36					15			
39	Balong	76	76	-	-	76	-	-	50		26	76					25			
40	Ranca Tungal	10	10	-	-	10	-	-	10			10					5			
41	Gronggong	42	42	-	-	42	-	-	22		20	42					10			
42	Patapan	41	41	-	-	41	-	-	28			41					23			
43	Sawah Banjar	6	6	-	-	6	-	-	6			6					6			6
44	Kleret	12	12	-	-	12	-	-	12			12					12			12
45	Suminta	19	19	-	-	19	-	-	19			19					19			
46	Ciawi	378	363	-	15	359	-	19	238		135	359		19			130			
47	Plester	72	59	-	13	59	11	2	59		13	59	11	2	51		21			
48	Cimanis	261	253	8	-	253	6	2	159		92	253	6	2			130			130
49	Ketos	363	295	-	68	298	44	21	295		68	298	44	21	195		156			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26
50	Sendi	23	23	-	-	23	-	-	13		10	23					5			
51	Cigembor	18	18	-	-	18	-	-	18			18								
52	Citelang I	9	9	-	-	9	-	-	9			9					4			
53	Karoya	7	7	-	-	7	-	-	7			7					7			
54	Umbar	6	6	-	-	6	-	-	6			6					3			
	Jumlah	9.790	8.481	906	403	8.563	957	270	6.241	446	1.979	8.162	993	346	776	-	3.729	-	301	986
	JUMLAH	50.914	44.274	3.520	3.120	42.129	3.559	5.226	39.584	3.019	6.817	40.668	3.625	5.552	1.073	-	11.837	-	2.928	5.564
				50.914			50.914			49.420		49.845				12.910			8.492	
	Persentase (%)						100,00					100,86							65,78	267

Tabel III.12
Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 2

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	1. Adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 186 Tahun 2022 tentang Recana Tata Tanam, Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi Tahun 2022/2023 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2023	Pemenuhan kebutuhan air yang bersumber dari Kabupaten lain	1. Penguatan kebijakan tata tanam 2. Peningkatan kondisi dan fungsi jaringan irigasi

Tabel III.13
Kinerja Program Sasaran 2

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Prosentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	Prosen	39,27	39,42	48,94	80,55	40,78	83,33

Tabel III.14
Kinerja Keuangan Sasaran 2

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	54.838.773.700	52.701.601.740	96,10
I.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.152.435.500	25.603.090.900	97,90
I.1.1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	362.638.800	353.131.000	97,38
I.1.2.	Pembangunan Tanggul Sungai	16.902.604.500	16.570.453.660	98,03
I.1.3.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	2.840.965.400	2.779.144.920	97,82
I.1.4.	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.046.226.800	5.900.361.320	97,59
I.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.686.338.200	27.098.510.840	94,46
I.2.1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	277.834.000	270.565.220	97,38
I.2.2.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	22.407.557.200	20.938.699.380	93,44
I.2.3.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	99.442.300	95.292.300	95,83
I.2.4.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.901.504.700	5.793.953.940	98,18
Jumlah		54.838.773.700	52.701.601.740	96,10

Foto III.7 Pembangunan Senderan Sungai Ciparigi Kec. Dukupuntang



Foto III.8 Pemasangan Bronjong Kali Jamblang Desa Pesanggrahan Kec. Plumbon



Foto III.9 Normalisasi Kali Soka Kec. Plumbon



Foto III. 10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ketos



Foto III. 11 Normalisasi Saluran Irigasi Desa Gegesik Kulon Kec. Gegesik



1.3. Sasaran 3 :

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang diukur dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.15
Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW}} \times 100$

Sumber data diolah dengan hasil perhitungan data realisasi Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan dibagi Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW dikali 100, target sasaran ini ditahun 2023 yaitu 27,28%, indikator ini dengan realisasi masih 22,22%, sehingga perhitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.16
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022 %	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Triwulan III terhadap target Renstra %
				Target %	Realisasi %	Capaian		
	Ketaatan terhadap RTRW	Prosen	16,67	27,28	22,22	81,45	33,33	66,67

$$4/18 = 22.22\%$$

Untuk merealisasikan Ketaatan terhadap RTRW, diperlukannya adanya penyusunan aturan atau kajian tentang Rincian Detail Tata Ruang (RDTR) dari Rencana Tata Ruang wilayah, pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan dan Tata

Ruang telah menyelesaikan tahapan perubahan RTRW, pada akhir tahun 2023 diketahui realisasi Ketaatan terhadap RTRW sebesar 22,22%.

Tabel III.17
Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 3

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Ketaatan terhadap RTRW	Peran RTR sebagai acuan dalam pemberian perizinan berusaha dan non berusaha menjadi sangat krusial saat ini. Investor yang akan mendirikan usaha di suatu daerah harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTR saat mengajukan perizinan berusaha dan non berusaha untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kebijakan dan perkembangan daerah yang dinamis, sehingga materi teknis dan rencana berubah-ubah (KKPR, PSN, mutasi/rotasi pejabat). ○ Mekanisme penyusunan dan penetapan yang terlihat sederhana namun rumit ketika ditempuh, sehingga membutuhkan waktu dan koordinasi yang panjang. ○ Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia di daerah. ○ Terbatasnya kewenangan provinsi dalam RDTR, sehingga kurang optimalnya dalam monitoring progres RDTR dan sinkronisasi terhadap RTR . ○ Persyaratan administrasi dan substansi yang cukup banyak, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk pemenuhannya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan dan fasilitasi konsultasi kepada Kab/ Kota terkait strategi penguatan rencana/ kebijakan dan antisipasi perubahan di daerah dalam Ranperda RTRW Kab/Kota. ● Percepatan evaluasi dan pembahasan di provinsi. ● Membantu koordinasi dengan K/L dan sektor terkait. ● Pengusulan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN

Tabel III.18
Kinerja Program Sasaran 3

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Prosen	20	20	20	100,00	100	80
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang	Prosen	72,09	77,91	65,45	84,01	85,26	76,77

Tabel III.19
Kinerja Keuangan Sasaran 3

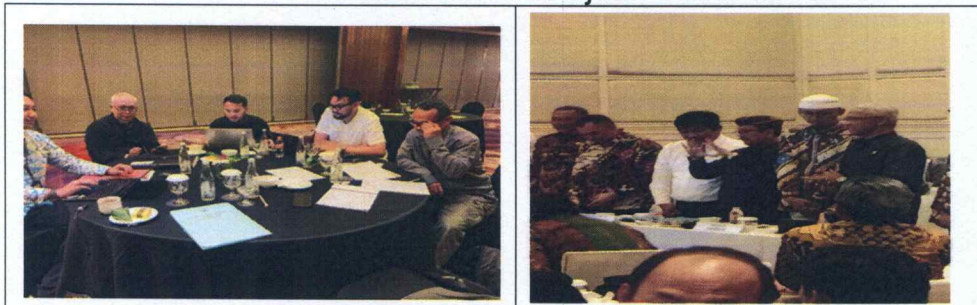
No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	86.614.000	84.952.880	98,08
I.1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	86.614.000	84.952.880	98,08

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	86.614.000	84.952.880	98,08
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	968.328.000	959.357.140	99,07
2.1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten/Kota	629.404.000	625.744.060	99,42
2.1.1.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	629.404.000	625.744.060	99,42
2.2	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	179.380.000	176.603.760	98,45
2.2.1.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	179.380.000	176.603.760	98,45
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.544.000	157.009.320	98,41
2.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	159.544.000	157.009.320	98,41
Jumlah		1.054.942.000	1.044.310.020	98,99

Foto III.12 Fasilitas Persetujuan Subtansi RTRW



Foto III.13 Fasilitas Persetujuan Subtansi RDTR



1.4. Sasaran 4 :

Kinerja sasaran Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal diukur dengan indikator Persentase layanan informasi jasa konstruksi, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.20
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi}}{\text{Jumlah Layanan Informasi yang di rencanakan}} \times 100$

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini meliputi dua layanan pokok, yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Pada tahun 2023 layanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sejumlah 80 Orang dan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 100 Orang sampai dengan tahun 2023 tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat sebanyak 474 Orang, Adapun layanan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan realisasi 2 Dokumen.

Tabel III.21
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1	Terciptanya pelayanan jasa konstruksiyang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	Prosen	70	85	85	100,00	100	85,00

Tabel III.22
Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 4

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKKK) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 1 Tahun 2023 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya Kesadaran atau Pemahaman Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa tentang Pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Penggunaan teknologi yang terbatas atau kurangnya implementasi sistem informasi terintegrasi dapat menghambat proses 	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Pembinaan Kepada Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Mengoptimalkan aplikasi system informasi yang ada dengan cara pengembangan aplikasi dan sosialisasi kepada masyarakat jasa konstruksi tentang perlunya aplikasi untuk mengakses

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		<p>Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota</p> <p>6. Perbup No 7 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PUTR</p>	<p>pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi informasi.</p> <p>3. Terib Usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi belum dilaksanakan secara sempurna oleh pengguna dan penyedia jasa konstruksi</p>	<p>informasi jasa konstruksi</p> <p>4. Melaksanakan Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan</p>

Tabel III.23
Kinerja Program Sasaran 4

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Prosen	60	80	80	100,00	100	80

Tabel III.24
Kinerja Keuangan Sasaran 4

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	439.696.000	437.742.880	99,56
I.1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	326.711.800	324.992.580	99,47
I.1.1.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	159.817.300	159.665.200	99,90
I.1.2.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	166.894.500	165.327.380	99,06
I.2.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	112.984.200	112.750.300	99,79
I.2.1.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	112.984.200	112.750.300	99,79
Jumlah		439.696.000	437.742.880	99,56

Foto III.14 Pelatihan Tenaga Terampil

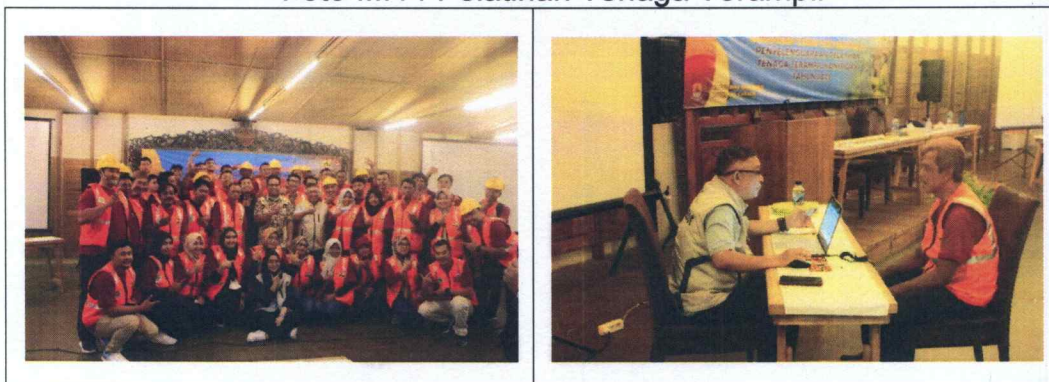


Foto III.15 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas



1.5. Sasaran 5 :

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan diukur dengan indikator Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.25
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat

Sumber data diolah dengan hasil evaluasi dokumen Laporan kinerja tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun N terhadap laporan akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, target sasaran ini ditahun 2023 yaitu 73 Point, realisasi indikator tercapai sebesar 73,70 point dengan capaian 101,05%, merupakan hasil evaluasi lakip tahun 2022.

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.26
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Triwulan III terhadap target Renstra %
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	63,73	73	73,70	100,96	75	98,27

Tabel III.27
Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 5

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	1. Dukungan Sumber Daya Manusia 2. Komitmen Pimpinan dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan 3. Sarana dan prasarana yang memadai	Ketersediaan data yang kurang tepat waktu	Melaksanakan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala

Tabel III.28
Kinerja Program Sasaran 5

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas	Prosen	100	100	100	100,00	100	100,00

Tabel III.29
Kinerja Keuangan Sasaran 5

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.941.848.318	35.707.528.718	89,40
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.015.900	95.804.020	93,91
I.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.515.900	45.791.740	92,48
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.500.000	50.012.280	95,26
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.158.937.340	23.481.463.437	89,76
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.108.723.940	23.432.726.157	89,75
I.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.999.800	100,00
I.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.213.600	43.737.480	96,74

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	Rp.
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.044.000	199.077.000	99,52
I.3.1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.044.000	199.077.000	99,52
I.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.327.400	699.827.799	99,93
I.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.300	9.999.300	100,00
I.4.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.729.800	24.644.700	99,66
I.4.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.900	79.999.900	100,00
I.4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.760.000	95.760.000	100,00
I.4.5.	Penyediaan Bahan/Material	151.241.800	151.241.800	100,00
I.4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	100,00
I.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.601.000	298.515.059	99,97
I.4.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.995.600	34.667.040	99,06
I.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.321.036.000	7.902.058.575	84,78
I.5.1.	Pengadaan Alat Besar	9.264.084.000	7.851.943.575	84,76
I.5.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.952.000	50.115.000	88,00
I.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.386.928	631.084.897	92,89
I.6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	679.386.928	631.084.897	92,89
I.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.780.100.750	2.698.212.990	97,05
I.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	767.983.500	744.446.000	96,94
I.7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.984.100	63.307.900	93,12
I.7.3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	675.993.600	669.355.760	99,02
I.7.4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.961.650	172.535.010	98,05
I.7.5.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62.790.000	62.790.000	100,00
I.7.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	964.727.900	921.118.320	95,48
I.7.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.660.000	64.660.000	100,00
Jumlah		39.941.848.318	35.707.528.718	89,40

Foto III.16 Forum OPD



Foto III.17 Rapat Evaluasi



1.6. Sasaran 6 :

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung diukur dengan indikator Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.30
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah Komulatif capaian Prosentase penduduk berakses air minum, Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun, Persentase Rumah Tinggal bersanitasi, dan Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan}}{4} \times 100$

Sumber data diolah dengan hasil perhitungan komulatif data realisasi capaian Program (outcome) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Penataan Bangunan Gedung dibagi 4, indikator ini dengan realisasi 47,91% dengan capaian 75,18% dari target tahun 2023 sebesar 63,72%, kondisi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,51 % realisasi tahun lalu sebesar 45,40%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan 4 (empat) program terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pelaksanaan program dimaksud sebagai Upaya pengembangan dan peningkatan cakupan layanan Air Minum di Kabupaten Cirebon dengan realisasi 92,96% yang capainya 128,50 % dari target yang direncanakan sebesar 72,34%, dalam rangka pencapaian target Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di tahun 2023 telah melaksanakan Pembangunan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sejumlah 1.695 SR dan pengadaan pompa booster sebanyak 2 Unit .
2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, pelaksanaan program ini sebagai Upaya mendukung pengelolaan persampahan dikabupaten Cirebon dengan realisasi 5,31% yang capainya baru 5,34% dari target yang direncanakan sebesar 99,52%%, dalam rangka pencapaian target pembangunan bangunan penampungan sampah di tahun 2023 telah melaksanakan pembangunan TPS3R sebanyak 10 Bangunan dan Penyediaan sarana dan prasarna TPAS.
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah pelaksanaan program dimaksud sebagai Upaya pengembangan dan peningkatan cakupan layanan akses air limbah domestik di Kabupaten Cirebon dengan realisasi 89,42% yang capainya 110,34 % dari target yang direncanakan sebesar 81,04%, dalam rangka pencapaian target Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di tahun 2023 telah melaksanakan Perluasan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman sejumlah 1.562 SR.
4. Program Penataan Bangunan Gedung pelaksanaan program dimaksud sebagai Upaya pengembangan dan peningkatan layanan Bangunan Gedung dengan realisasi 2% yang capainya 100 % dari target yang direncanakan sebesar 2%.

Tabel III.31
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023		Capaian	Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas penyediaansystem air minum, Persampahan, Airlimbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persamapahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosen	45,40	63,72	47,42	74,42	64,01	74,09

$$\frac{92,96\% + 5,31\% + 89,42\% + 2\%}{4} \times 100 = 47,42\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

➤ **Penanganan Penyediaan Air Minum**

pencapaian prosentase cakupan pelayanan air minum sampai dengan tahun 2023 sebanyak 772.028 Sambungan Rumah atau 92,96% dari jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Cirebon sejumlah 830.506 Kepala Keluarga, sampai dengan tahun 2023 capaiannya sebesar 128,50 % dari target yang direncanakan sebesar 72,34%, realisasi ini di capai adanya penambahan Sambungan Rumah tahun 2023 sebanyak 1.695 Sambungan Rumah, Cakupan Layanan Air Minum dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.32 Rekapitulasi SPAM

No.	Kecamatan	Jumlah SR S.D Tahun 2022	Pelaksanaan Tahun 2023	Jumlah SR S.D Tahun 2023
1	Losari	4.325		4.325
2	Pabedilan	1.403		1.403
3	Ciledug	810		810
4	Pasaleman	3.296		3.296
5	Waled	7.330		7.330
6	Babakan	3.442		3.442
7	Pabuaran	595		595
8	Karangwareng	10.175	120	10.295
9	Gebang	2.672		2.672
10	Karangsembung	77		77
11	Lemahabang	5.218		5.218
12	Susukan Lebak	5.676	245	5.921
13	Sedong	28.975	150	29.125
14	Greged	26.778		26.778
15	Astanajapura	2.661	103	2.764
16	Pangenan	2.024		2.024
17	Mundu	9.343	241	9.584
18	Beber	39.653		39.653
19	Talun	47.276	576	47.852
20	Sumber	34.023	155	34.178
21	Dukupuntang	23.776		23.776
22	Palimanan	8.570	105	8.675
23	Plumbon	4.050		4.050
24	Weru	0		0
25	Kedawung	400		400
26	Gunungjati	19.081		19.081
27	Kapetakan	28.044		28.044
28	Suranenggala	9.760		9.760
29	Jamblang	6.109		6.109
30	Klangenan	6.490		6.490
31	Arjawinangun	35.638		35.638
32	Panguragan	35.565		35.565
33	Ciwaringin	12.011		12.011
34	Susukan	7.179		7.179
35	Gegesik	37.060		37.060
36	Kaliwedi	12.396		12.396
37	Depok	6.122		6.122
38	Gempol	18.215		18.215

No.	Kecamatan	Jumlah SR S.D Tahun 2022	Pelaksanaan Tahun 2023	Jumlah SR S.D Tahun 2023
39	Plered	500		500
40	Tengah Tani	260		260
41	Non Perumahan	6		6
42	Perum Puri Cirebon Lestari	165		165
43	Puri Taman Sumber Indah	172		172
44	Perum The Garden	264		264
45	Perum Mega Residence	19		19
46	PT Toyamelindo	1		1
47	Perum Greenland	86		86
48	Rivera	22		22
49	Dinkes	222.578		222.578
50	PDAM	40.042		40.042
Jumlah		770.333	1.695	772.028

Foto III.18 Pembangunan SPAM



➤ Penanganan Bangunan Penampungan Sampah

Kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2023 untuk mendukung pengelolaan sampah dikabupaten Cirebon Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan Pembangunan TPS3R sejumlah 10 Bangunan, yang alokasi anggaran melalui Bantuan keuangan Provinsi sebanyak 8 Bangunan dengan Lokasi Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Arjawinangun, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber, Desa Mertasingan Kec. Gunungjati, Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Talun dan Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 1 Bangunan dengan lokasi Desa Wilulang Kecamatan

Susukan Lebak, dan 1 Bangunan melalui APBD Kabupaten dengan Lokasi Desa Kenanga Kecamatan Sumber serta peningkatan sarana dan prasarana TPAS Kubangdeleg.

Tabel III.33 Layanan Pengelolaan Sampah

No	Uraian	Rumah Tangga yang terlayani
1.	TPAS Kubangdeleg	128.000
2.	TPS 3 R Kecamatan Sumber	800
3.	TPS 3 R Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani	800
4.	TPS 3 R Kecamatan Arjawinangun	800
5.	TPS 3 R Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang	800
6.	TPS 3 R Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber	800
7.	TPS 3 R Desa Mertasingan Kec. Gunungjati	800
8.	TPS 3 R Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi	800
9.	TPS 3 R Kecamatan Talun	800
10.	TPS 3 R Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung	800
11.	TPS 3 R Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak	331
Jumlah		135.531

Foto III.19 Bangunan Penampungan Sampah

peningkatan sarana dan prasarana TPAS Kubangdeleg



Pembangunan TPS-3R di Kecamatan Sumber

Pembangunan TPS3R Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi

➤ **Penanganan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

pencapaian prosentase akses air limbah domestik sampai dengan tahun 2023 sebanyak 688.679 Sambungan Rumah Tangga atau 89,42% dari jumlah Bangunan Rumah yang ada di Kabupaten Cirebon sejumlah 770.160 Unit, sampai dengan tahun 2023 capaiannya sebesar 110,34 % dari target yang direncanakan sebesar 81,04%, realisasi ini di capai adanya penambahan Pembangunan Septi Tank Individu dan Komunal di tahun 2023 sebanyak 1.562 Sambungan Rumah Tangga, Cakupan akses air limbah domestik dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.34 Cakupan akses air limbah domestik

NO	KECAMATAN	Sambungan Akses Air Limbah Domestik s.d Tahun 2022	Pelaksanaan Tahun 2023	Sambungan Akses Air Limbah Domestik s.d Tahun 2022
1	Losari	21.052		21.052
2	Pabedilan	14.630	71	14.701
3	Ciledug	15.893		15.893
4	Pasaleman	15.255		15.255
5	Waled	14.867	160	15.027
6	Babakan	25.185		25.185
7	Pabuaran	12.410		12.410
8	Karangwareng	24.338		24.338
9	Gebang	13.580		13.580
10	Karang Sembung	12.768		12.768
11	Lemahabang	17.523		17.523
12	Susukan Lebak	10.869		10.869
13	Sedong	14.007		14.007
14	Greged	11.106		11.106
15	Astanajapura	22.643	161	22.804
16	Pangenan	21.250		21.250
17	Mundu	20.850	228	21.078
18	Beber	18.780		18.780
19	Talun	14.851	366	15.217
20	Sumber	17.145		17.145
21	Dukupuntang	13.911		13.911
22	Palimanan	12.824		12.824
23	Plumbon	16.687	75	16.762
24	Weru	16.179		16.179
25	Kedawung	15.684		15.684
26	Gunungjati	24.802		24.802
27	Kapetakan	19.928		19.928
28	Suranenggala	15.233		15.233
29	Jamblang	16.090	286	16.376
30	Klangenan	14.200		14.200
31	Arjawinangun	19.742		19.742
32	Panguragan	22.052		22.052
33	Ciwaringin	17.052		17.052
34	Susukan	14.100		14.100
35	Gegesik	25.437		25.437
36	Kaliwedi	23.360	215	23.575
37	Depok	16.883		16.883
38	Gempol	15.465		15.465
39	Plered	14.369		14.369
40	Tengahtani	14.118		14.118
	JUMLAH	687.118	1.562	688.680

Foto III.20 Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik

<p>Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) KSM Kalibuntu Buana Sehat Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedian</p>	<p>Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) KSM Kalideres Jembar Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi</p>
	
<p>Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK KSM Gunungsari Sejahtera Desa Gunungsari Kecamatan Waled</p>	<p>Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK KSM Munjul Sehat Desa Munjul Kecamatan Astanajapura</p>
	

➤ **Layanan Bangunan Gedung**

Dalam pelaksanaan layanan bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanaakn Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) sejumlah 567 Dokumen, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sejumlah 130 Dukumen dan melakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung sejumlah 4 Bangunan, serta Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung sejumlah 20 Dokumen.

Foto III.21 Layanan Bangunan Gedung

Rapat Persetujuan Bangunan Gedung



Tabel III.35
Analisa Penyebab keberhasilan Sasaran 5

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung			
	- Penanganan Penyediaan Air Minum	Adanya kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Cirebon	- Dalam hal Penanganan Penyediaan Air Minum, belum sebanding dengan kebutuhan SPM di masyarakat; - Terkendala kesiapan lahan; Untuk daerah pesisir pantai airnya payau dan kapasitas terbatas	- Penanganan Penyediaan Air Minum diharapkan sebanding dengan kebutuhan SPM di masyarakat; - Lahan harus ada dan siap; Air laut harus disuling sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat
	- Penanganan Bangunan Penampungan Sampah	Adanya Program prioritas Pembangunan daerah melalui strategi Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	- Bangunan Penampungan Sampah Belum berbanding lurus akan kebutuhan bangunan penampungan sampah - Terkendala kesiapan lahan	- Melaksanakan Pembangunan bangunan penampungan sampah dan penyediaan lahan secara bertahap
	- Penanganan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Adanya Arah kebijakan penerapan standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan daerah	- Dalam hal Penanganan Pengelolaan Air Limbah Domestik, belum sebanding dengan kebutuhan SPM di masyarakat; - Pola fikir Masyarakat masih terkait kesehatan lingkungan; Terkendala kesiapan lahan	- Penanganan Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan sebanding dengan kebutuhan SPM di masyarakat ; - Masyarakat diberikan sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan - Penyediaan Lahan secara bertahap
	- Layanan Bangunan Gedung	Adanya : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung 2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 650/Kep.754-DPUTR/2021 tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Bangunan Gedung	Kekurangan SDM dalam pelayanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Mengoptimalkan dan meningkatkan kompetensi SDM yang ada

Tabel III.37
Kinerja Program Sasaran 6

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	prosentase cakupan pelayanan air minum	Prosen	94,68	72,34	92,96	128,50	73	127,34
2.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	Prosen	0,48	99,52	5,31	5,34	100	5,31
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	prosentase cakupan akses air limbah domestik	Prosen	84,45	81,04	89,42	110,34	81,06	110,31
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Prosen	2	2	2	100,00	2	100,00

Tabel III.38
Kinerja Keuangan Sasaran 6

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.184.356.200	11.798.918.750	96,84
I.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.184.356.200	11.798.918.750	96,84
I.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	143.529.200	139.484.440	97,18
I.1.2.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	148.541.300	146.376.880	98,54
I.1.3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.392.745.000	11.020.113.350	96,73
I.1.4.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	299.540.700	294.082.580	98,18
I.1.5.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200.000.000	198.861.500	99,43
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.393.184.500	11.117.407.500	97,58
2.1.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	11.393.184.500	11.117.407.500	97,58
2.1.1.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.393.184.500	11.117.407.500	97,58
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.471.140.700	15.444.800.340	99,83
3.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.471.140.700	15.444.800.340	99,83
3.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.031.300	53.005.180	94,60
3.1.2.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	15.415.109.400	15.391.795.160	99,85
4.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.707.220.200	14.556.536.930	98,98
4.1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	14.707.220.200	14.556.536.930	98,98

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
4.1.1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	585.543.000	585.543.000	100,00
4.1.2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	845.000.000	837.395.300	99,10
4.1.3.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	56.908.600	56.853.040	99,90
4.1.4.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	85.074.600	71.139.890	83,62
Jumlah		53.755.901.600	52.917.663.520	98,44

C. Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang di alokasikan untuk pedanaan program/kegiatan dan sub. Kegiatan dalam pencapaian 6 sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.39 Efisiensi dan Efektivitas per Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja	No.	Keuangan			
				Target	Realisasi			Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	%	86	84,56	98,33	1	Program Penyelenggaraan Jalan	119.544.576.500	116.564.777.545	97,51
							2	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	14.434.554.700	14.123.906.780	97,85
			Capaian dari Indikator			98,33	Total Per Sasaran		133.979.131.200	130.688.684.325	97,54
				Tingkat Efisiensi		2,46					
				Tingkat Efektivitas		100,80%					
2	Terpenuhinya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air secara Optimal	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	%	88	89	101,14	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	54.838.773.700	52.701.601.740	96,10
			Capaian Indikator			101,14	Total Per Sasaran		54.838.773.700	52.701.601.740	96,10
				Tingkat Efisiensi		3,90					
				Tingkat Efektivitas		105,24%					
3	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	27,28	22,22	81,45	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	968.328.000	959.357.140	99,07
			Capaian Indikator			81,45	2	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	86.614.000	84.952.880	98,08
						81,45	Total Per Sasaran		1.054.942.000	1.044.310.020	98,99
				Tingkat Efisiensi		1,01					
				Tingkat Efektivitas		82,28%					
4	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	%	85	85	100,00	1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	439.696.000	437.742.880	99,56
			Capaian Indikator			100,00	Total Per Sasaran		439.696.000	437.742.880	99,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tingkat Efisiensi	0,44					
					Tingkat Efektifitas	100,45%					
5	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Point	73	73,7	100,96	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.941.848.318	35.707.528.718	89,40
			Capaian Indikator			100,96	Total Per Sasaran		39.941.848.318	35.707.528.718	89,40
					Tingkat Efisiensi	10,60					
					Tingkat Efektifitas	112,93%					
5	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	%	63,78	47,42	74,35	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.184.356.200	11.798.918.750	96,84
							2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.393.184.500	11.117.407.500	97,58
							3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.471.140.700	15.444.800.340	99,83
							4	Program Penataan Bangunan Dan Gedung	14.707.220.200	14.556.536.930	98,98
			Capaian Indikator			74,35	Total Per Sasaran		53.755.901.600	52.917.663.520	98,44
					Tingkat Efisiensi	1,56					
					Tingkat Efektifitas	75,53%					
			Total Keseluruhan				Total Keseluruhan		284.010.292.818	273.497.531.203	96,30

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak enam sasaran dengan enam indikator yang ingin dicapai, secara rinci pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Terdapat 2 Indikator kinerja Sasaran yang melebihi target yaitu Meningkatnya persentase Intensitas Tanam dengan capaian 101,14 % dan Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan dengan Capaian 100,96%;
- ❖ Terdapat 1 Indikator kinerja sasaran sesuai dengan target yaitu sasaran Persentase layanan informasi jasa konstruksi dengan capaian 100%;
- ❖ Terdapat 2 Indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yaitu sasaran Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap) dengan Capaian 98,33%, Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung dengan capaian 75,12%.

IV.1. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 Indikator Kinerja sasaran tersebut terdapat 4 Indikator Kinerja sasaran dengan hasil sangat Baik, 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil Baik dan 1 Indikator dengan hasil Sedang.dengan rata-rata capaian sasaran di tahun 2023 sebesar 92,67%

Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai mengelola anggaran sebesar Rp. 284.010.292.818,- dengan realisasi anggaran Rp. 273.497.531.203,- atau 96,30 % sisa anggaran sebesar Rp. 10.512.761.615,- atau 3,70%.

Sedangkan untuk tingkat efisiensi dan efektifitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- ❖ Sasaran 1 Tingkat efisiensi 2,46 % dan tingkat efektifitas 100,80%;
- ❖ Sasaran 2 Tingkat efisiensi 3,90 % dan tingkat efektifitas 105,24%;
- ❖ Sasaran 3 Tingkat efisiensi 1,01 % dan tingkat efektifitas 82,88%;
- ❖ Sasaran 4 Tingkat efisiensi 0,44 % dan tingkat efektifitas 100,45%;
- ❖ Sasaran 5 Tingkat efisiensi 10,60 % dengan tingkat efektifitas 112,93%
- ❖ Sasaran 6 Tingkat efisiensi 1,56 % dengan tingkat efektifitas 76,31%

Dalam pencapaian Sasaran dan indikator sasaran pada Tahun 2023 terhadap capaian akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon pada 2019 - 2024, secara keseluruhan tingkat capaian baru 92,86 %.

IV.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dan langkah kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon :

1. Peningkatan sinergitas pada lingkup pemerintah daerah, terhadap program pembangunan daerah terutama pada sektor-sektor yang menjadi program unggulan atau prioritas daerah;
2. Melakukan optimalisasi koordinasi dengan pihak instansi pemerintah provinsi maupun pusat dalam hal pembangunan infrastruktur daerah;
3. Melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan para stakeholder dalam pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seluruh jajaran Instansi Pemerintah;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja yang tersusun dengan melalui kebijakan yang mewadahi dalam penyusunan Laporan kinerja agar terarah dan menghasilkan dokumen laporan yang baik.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 kepada pihak-pihak terkait dan hal tersebut sebagai bahan untuk selalu meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

IV.3. Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Membuat Diagram Crosscutting	Dinas Pekerjaan Umum telah Menyusun atau membuat Diagram Crosscutting
2.	Dalam Pengukuran kinerja dan pengumpulan ditambahkan lampiran tentang defines operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Telah melampirkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
3	Dokumen laporan kinerja dituangkan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Banchmark Kinerja)	Telah menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level atasnya (Provinsi)
4.	Melibatkan SDM yang telah mengikuti Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan LAKIP dengan melampirkan sertifikat Pelatihan/Sosialisasi	Telah melibatkan SDM yang memiliki sertifikat Bimtek penyusunan LAKIP

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IWAN RIZKI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Pihak Kesatu,

Ir. IWAN RIZKI
Pembina Tk. I
NP. 19660223 199303 1 004



LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	Jumlah Kumulatif persentase Kondisi Jalan Mantap, Kondisi Jaringan Irigasi Baik dan Persentase kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dibagi 3	Non Kumulatif	Meningkat	Survey	79.48 Prosen	79.48 Prosen
4.1.01	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Survey kondisi jalan	86 Prosen	86 Prosen
4.1.02	Meningkatnya ketersediaan air melalui Infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	-	86.33 Prosen	86.33 Prosen
4.1.03	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketepatan terhadap RTRW	Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan/ jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah Realisasi perda pada tahun berjalan	27.28 Prosen	27.28 Prosen
4.1.04	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah Realisasi Layanan Informasi/ Jumlah Layanan Informasi yang direncanakan x 100	Non Kumulatif	Meningkat	-	85 Prosen	85 Prosen
4.1.05	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh inspektorat	Non Kumulatif	Meningkat	-	73 Poin	73 Poin
4.1.06	Meningkatnya Kualitas penyediaan sistem air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Persentase penyediaan sistem air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Jumlah Kumulatif capaian Persentase penduduk berakses air minum, Persentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun Persentase Rumah Tinggal bersantasi, dan Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan dibagi 4	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Bangunan Gedung dan sanitasi Perumahan	63.72 Prosen	63.72 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.769.554.700,00	14.434.554.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBHPKB-Jalan
4.1.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.987.576.500,00	119.544.576.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBHPKB-Jalan
4.1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.404.973.900,00	54.838.773.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBHPKB-Jalan
4.1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	86.614.000,00	86.614.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
4.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	618.328.000,00	968.328.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBHPKB-Jalan
4.1.04.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	439.696.000,00	439.696.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (3)	Sesudah (4)	
(1)	(2)			(5)
4.1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.350.025.734,00	39.941.848.318,00	Sumber Dana: DTU-DAU
4.1.06.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	791.611.200,00	12.184.356.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
4.1.06.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.993.184.500,00	11.393.184.500,00	Sumber Dana: Bankreu Prov. DAK Fisik B.Santiasi Pen. DTU-DAU
4.1.06.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	525.884.200,00	15.471.140.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU
4.1.06.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.967.374.200,00	14.707.220.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBHPKB- jalan
J U M L A H		202.934.822.934,00	284.010.292.818,00	



RENCANA AKSI

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN KERJA BERANGKAT DASRAH
SASARAN STRATEGIS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KESATU

NO	AKSI / STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	BENTUK PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA			
			TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru			Perawatan kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang (Meningkat)							
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	Monev/evaluasi Kinerja Jumlah Rencana Kerja/Kelompok Kerja Penyusunan Rencana, Strategi dan Taktis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Penyajian Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Aksi dan Laporan Teknis, Kegiatan (Kegiatan, Rencana Taktis, Laporan Teknis, Pengendalian Pelaksanaan) Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Persebaran Jalan yang Dibutuhkan Rekonstruksi Jalan Persebaran Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Persebaran Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Persebaran Jembatan yang Dilakukan Penggantian Persebaran Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	PROGRAM PENGELOMPOKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENYELANGGARAN JALAN	Kegiatan Pengalihan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Suburban/Desa Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Desa	SUB KEGIATAN Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taktis Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Desa	1.857.538.580 1.857.538.580 12.240.000 1.845.298.580 17.094.298.550 17.094.298.550 54.984.800 20.222.800 13.553.097.350 1.597.944.700 2.457.779.200 873.100 400.000 19.591.834.130	4.435.835.320 4.435.835.320 66.054.900 4.369.780.420 28.981.233.350 28.981.233.350 583.140.000 300.090.000 22.525.841.950 3.741.065.100 134.095.200 979.128.900 608.278.200 33.317.048.670	4.518.846.800 4.518.846.800 9.924.000 4.608.722.800 45.302.805.100 45.302.805.100 49.820.000 19.848.000 46.794.202.000 4.303.046.900 115.303.200 20.000.000 625.000 48.921.251.900	857.534.000 857.534.000 9.924.000 847.610.000 9.100.442.900 9.100.442.900 49.820.000 19.848.000 7.847.948.800 1.078.844.300 115.381.400 - - 9.866.976.500	
Jumlah										

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SASARAN STRATEGIS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 : KEDUA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR INERBUA				TARGET						
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV							
Mengikutiya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA												
1	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	√	√	√	√	ASB (SDA)	Kegiatan Pengaliran SDA dan Bangunan Pemaman Peralat pada Wilayah Sungai (MS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.565.610.500	10.805.710.100	17.020.065.000	90.35%
2	Peningkatan Uprate Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	√	√	√	√				527.800.000	7.727.968.000	11.058.296.700	254.289.400
							Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Damu dan Bangunan Penampang Air Lainnya yang Disusun		53.008.700	45.010.100	24.810.000	24.810.000
							Perencanaan, Tanggapi Sungai (Dibangun Panjang Tanggapi Sungai yang Direhabilitasi		81.840.000	5.290.231.000	6.842.114.100	70.818.000
							Panjang Sungai yang Dinormalsasi/ Direstorasi		43.672.400	510.961.000	716.648.000	39.696.000
							Panjang Sungai yang Dinormalsasi/ Direstorasi		349.259.000	1.422.275.900	3.469.276.600	118.965.400
							Kegiatan Pengembangan dan Pengaliran Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.057.726.800	3.067.741.300	5.961.708.300	729.298.000
							Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Bangunan Penampang Irigasi yang Dibangun		47.227.000	30.734.400	14.896.000	14.896.000
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		20.962.400	1.470.169.900	3.982.601.100	8.924.000
							Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang Diperbaiki dan Dipelebara		1.363.000	96.048.600	1.964.291.200	714.488.000
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman		960.940.000	1.469.788.000	1.964.291.200	714.488.000
							Jumlah		1.545.610.500	10.805.710.100	17.020.065.000	993.588.200

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA											
NO	AKSI / STRATEGI	JUMLAH PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM LINGKUNGANNYA	KEGATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			TK IV
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	
1	Meningkatkan akurasi perencanaan dan pengendalian perencanaan	V	V	V	V	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Perencanaan Bangunan dan Lingkungan di KabupatenKota	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Pengembangan Peraturan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah KabupatenKota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Perencanaan Bangunan dan Lingkungan di KabupatenKota	TK. I 25.145.000	TK. II 26.295.000	TK. III 24.481.000	TK. IV 10.693.000
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Perencanaan Bangunan dan Lingkungan di KabupatenKota	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTUW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRW) KabupatenKota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Perencanaan Bangunan dan Lingkungan di KabupatenKota	TK. I 25.145.000	TK. II 26.295.000	TK. III 24.481.000	TK. IV 10.693.000
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Peraturan selain RTRW KabupatenKota	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah KabupatenKota	Persediaan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Perencanaan Ruang	TK. I 199.390.700	TK. II 26.177.000	TK. III 26.138.300	TK. IV 24.798.000
						Jumlah Dokumen Peringatan pemahaman dan menggugah jiwa Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah KabupatenKota	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perencanaan Ruang	TK. I 45.055.500	TK. II 40.743.000	TK. III 40.743.000	TK. IV 34.838.500
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Daerah	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perencanaan Ruang Daerah KabupatenKota	Konfirmasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Daerah KabupatenKota	TK. I 43.055.500	TK. II 40.743.000	TK. III 40.743.000	TK. IV 34.838.500
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Daerah	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perencanaan Ruang Daerah KabupatenKota	Konfirmasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Daerah KabupatenKota	TK. I 43.446.000	TK. II 44.896.000	TK. III 44.896.000	TK. IV 28.626.000
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Daerah	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMATIAN RUANG	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perencanaan Ruang Daerah KabupatenKota	Konfirmasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Daerah KabupatenKota	TK. I 63.446.000	TK. II 44.896.000	TK. III 44.896.000	TK. IV 28.626.000
Jumlah										309.837.200	150.101.000	148.248.300	96.955.500

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEEMPAT

NO	ASIS / STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARJEF			
			TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Konstruksi	Perentase layanan informasi jasa konstruksi OUTPUT/ HESLUARAN	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Efisiensi Peringkat Daerah		TK. I 207.559.400	TK. II 199.116.400	TK. III 46.998.200	TK. IV 25.524.000
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Ahli yang Mengikuti Pelatihan						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		TK. I 157.296.800	TK. II 141.873.200	TK. III 17.817.000	TK. IV 9.824.000
		Jumlah Pemada yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Konstruksi						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Konstruksi		TK. I 147.372.000	TK. II 7.389.200	TK. III 9.056.200	
		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Terlebi Uraha, Terlebi Penganggaran, dan Terlebi Pemeliharaan Jasa Konstruksi						Kegiatan Pengawasan Terlebi Uraha, Terlebi Penganggaran dan Terlebi Pemeliharaan Jasa Konstruksi		TK. I 66.262.000	TK. II 24.943.200	TK. III 26.878.500	TK. IV 15.800.000
								Pengawasan dan Evaluasi Terlebi Uraha, Terlebi Penganggaran, dan Terlebi Pemeliharaan Jasa Konstruksi		TK. I 66.262.000	TK. II 24.943.200	TK. III 26.878.500	TK. IV 15.800.000
						Jumlah				TK. I 207.559.400	TK. II 199.116.400	TK. III 66.666.200	TK. IV 25.524.000

BATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SASARAN STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEMUKA

SASARAN STRATEGIS

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PEKERJAAN TK. I TK. II TK. III TK. IV	INDIKATOR KINERJA				KEGIATAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	TARGET				
			TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
			PROYEKSI PENYEDIAAN SISTEM AIR MINUM, PENAMPAPAN, AIR LIMBAH DAN BANGUNAN GEODING							BAGU ANGGARAN (Rp.)				
1	Meningkatkan Kualitas penyediaan sistem air minum, Penampapan, Air limbah dan Bangunan Gedung	V V V V					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENTEDAAN AIR MINUM			87.999.800	297.818.100	270.781.600	135.061.800	63,77%
2	Meningkatkan Layanan penyediaan infrastruktur Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, penampapan, dan Prorogation Data Base	V V V V								87.999.800	297.818.100	270.781.600	135.061.800	
										10.802.800	61.250.000	60.875.000	10.600.800	
										59.558.000	26.968.000	64.226.300	13.840.000	
										16.800.000	17.659.000	154.659.500	110.612.200	
										1.000.000	190.000.000	1.000.000		
										2.992.200	47.477.600	2.942.714.600	3.900.000.000	
										2.992.200	47.477.600	2.942.714.600	3.900.000.000	
										2.992.200	47.477.600	2.942.714.600	3.900.000.000	
										47.170.200	304.145.700	141.920.000	32.798.300	
										47.170.200	304.145.700	141.920.000	32.798.300	
										15.450.000	15.985.000	14.765.000	9.924.000	
										31.654.200	288.290.200	127.154.200	22.794.300	

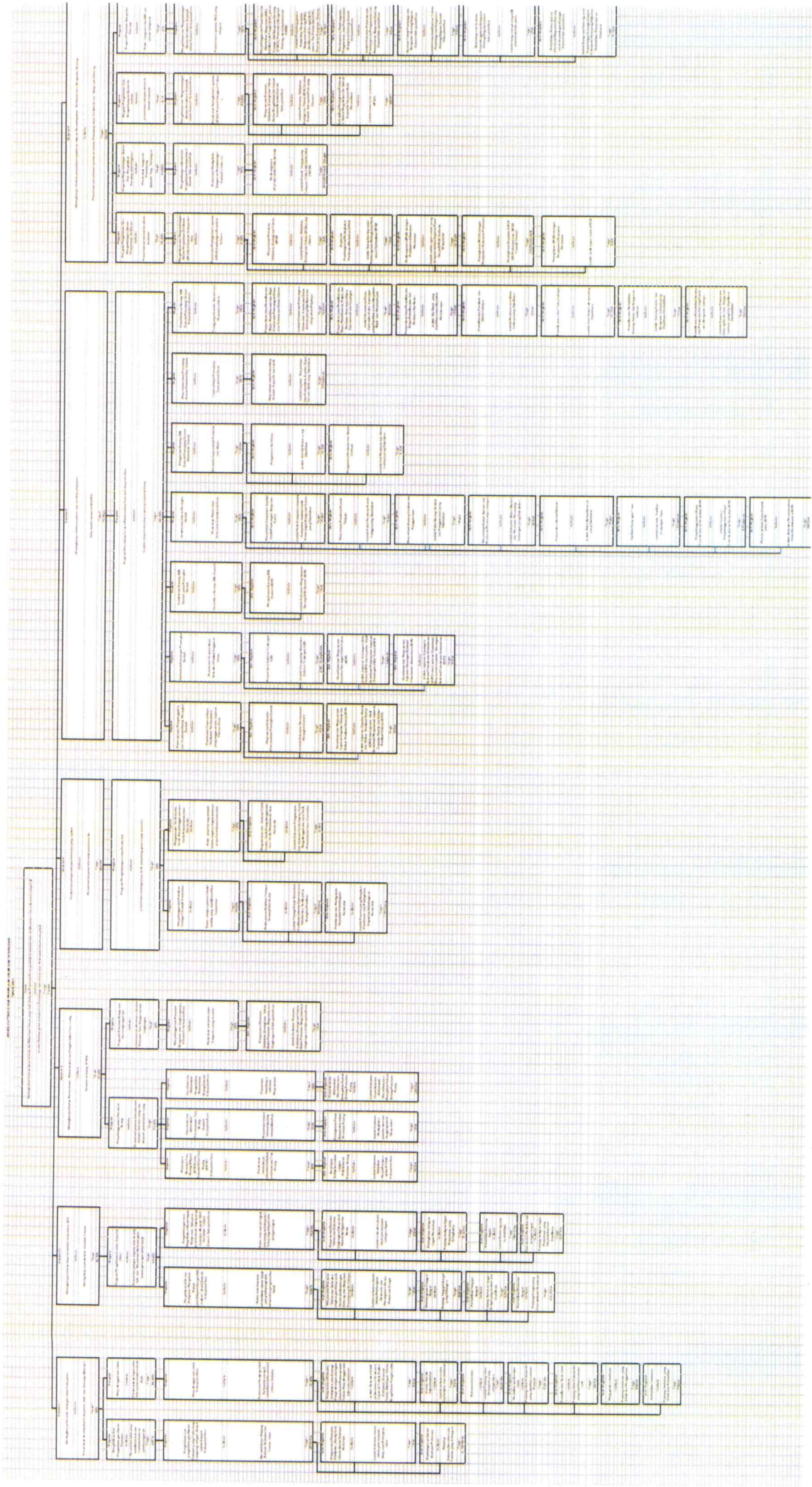
		PROGRAM PENANAMAN BANGUNAN GEDUNG			1.799.200.800	5.330.143.000	4.669.813.000	178.217.800
					1.799.200.800	5.330.143.000	4.669.813.000	178.217.800
Jumlah Penyelenggaraan Perbaikan Perawatan Bangunan Gedung (PBG), Serituk Lak Fungai (SLF) peran Tim Profesi Ahli (TPA), Perawatan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Perbaikan Ikon Mendirikan Bangunan (IMB) dan Serituk Lak Fungai Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Perbaikan Ikon Mendirikan Bangunan (IMB), Serituk Lak Fungai (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Perawatan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		142.701.200	138.603.000	138.677.000	126.225.200
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Penerimaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Penerimaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		275.000.000	-	-	-
Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		14.098.400	14.098.400	19.209.800	9.462.000
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota		18.861.000	24.632.000	27.031.600	14.480.000
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kependidikan, Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtau			Bangunan Gedung untuk Kependidikan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtau Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1.338.603.000	5.132.729.000	4.486.434.600	28.070.400
Jumlah					1.927.272.600	5.979.584.200	7.195.209.300	4.243.987.700

NO	MISI / STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA												
			JADWAL PELAKSANAAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET					TK IV	
			TK I	TK II	TK III				TK IV	TK I	TK II	TK III	TK IV		TK V
Mengalokasikan anggaran dan kualitas pelayanan															
1	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada					Nilai Hasil Evaluasi LKP SKPD	OUTPUT/ KELLUARAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TK I	TK II	TK III	TK IV	TK V
											18.995.027.400	10.914.800.300	11.050.340.300	825.000.504	
									Kegiatan Penanaman, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.007.700	21.022.800	20.871.100	20.251.500	
									Jumlah Dokumen Penanaman Perangkat Daerah		20.301.850	7.891.150	7.815.350	7.417.450	
									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Milar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Milar Realisasi Kinerja SKPD		13.073.750	13.134.400	12.855.700	12.834.000	
									Jumlah Orang yang Menama Gaji dan Tunjangan ASN		15.531.403.800	12.860.000	10.354.282.940	12.698.800	
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15.518.540.000	-	10.344.350.940	-	
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4.999.800	-	-	-	
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		9.824.000	12.860.000	9.824.000	12.698.800	
									Jumlah Dokumen Pengantar Barang Milik Daerah SKPD		100.022.000	100.022.000	-	-	
									Jumlah Administrasi Urusan Perangkat Daerah		100.022.000	100.022.000	-	-	
									Jumlah Paket Komposisi Insialasi Insialasi Luliah/Penerangan Bangunan Kantor yang Diwujudkan		102.448.900	107.325.800	107.176.800	98.331.800	
									Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Diwujudkan		2.354.500	2.321.000	2.532.800	2.791.200	
									Jumlah Paket Perbaikan Cerdas dan Perbaikan yang Diwujudkan		2.501.400	2.501.400	2.523.400	2.473.800	
									Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Diwujudkan		20.887.500	20.509.500	18.800.000	19.753.900	
									Jumlah Paket Bahan/Material yang Diwujudkan		23.940.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000	
									Jumlah Laporan Fasilitas Kujangan		41.012.500	42.203.200	41.283.600	26.860.500	
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Angp Diwujudkan SKPD		81.830.000	65.657.500	8.250.000	12.450.000	
									Jumlah Laporan Perencanaan Angp Diwujudkan SKPD		8.841.000	8.771.000	8.841.000	8.842.800	
									Jumlah Laporan Perencanaan Angp Diwujudkan SKPD		11.003.000	9.435.478.000	-	-	
									Jumlah Unit Alat Berat 2005 Diwujudkan		-	9.254.004.000	-	-	
									Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diwujudkan		11.900.000	171.302.000	-	-	
									Jumlah Laporan Perencanaan Jasa Komunikasi Sumber Daya AI dan Luliah yang Diwujudkan		881.270.000	158.800.000	158.800.000	50.317.344	
									Jumlah Laporan Perencanaan Jasa Komunikasi Sumber Daya AI dan Luliah yang Diwujudkan		881.270.000	158.800.000	158.800.000	50.317.344	

						090.122.000	716.191.150	464.315.750	483.412.350
						235.865.500	190.798.000	170.798.000	170.798.000
						30.857.500	1.740.000	23.820.000	2.798.000
						206.040.800	126.538.000	69.198.000	68.158.000
						118.417.850	18.948.000	18.948.000	18.948.000
						15.182.000	15.870.000	15.870.000	15.870.000
						270.320.750	346.188.850	140.043.750	158.193.750
						14.840.000	18.330.000	15.860.000	15.860.000
						16.895.074.400	10.814.628.330	11.165.348.390	835.009.884
						40.570.871.820	61.033.198.720	85.366.820.090	15.964.041.864
								202.534.822.834	



CROSS CUTTING



EVALUASI HASIL RENJA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Meningkatnya kondisi jaringan jalan Kabupaten 86 Prosen
2. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA 86.33 Prosen
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang 27.28 Prosen
4. Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal 85 Prosen
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan 73 Poin
6. Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung 63.72 Prosen

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Perkiraan Realisasi (Miliar Rupiah)					Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Tingkat Pencapaian Realisasi Kinerja dan Perkiraan Realisasi (Miliar Rupiah) Thn 2023 (%)	Tingkat Pencapaian Realisasi Kinerja dan Perkiraan Realisasi (Miliar Rupiah) Thn 2023 (%)	Kategori				
				K					I			II			III			IV								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
0.00.01.2.01.01	Kelembagaan	PROGRAM PERSIAPAN URSATUAS PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Kelembagaan aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan Non Kumudatif Menengah	100	274.901.838.800	100	28.432.601.240	100	39.841.848.700	25.71	5.263.172.076	41.67	15.131.442.367	52.84	25.959.566.670	100	35.707.528.738	100	35.707.528.738	100	73.308.044.744	100	26.73	DMAS		
0.00.01.2.01.02	Kelembagaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas, efisien, dan transparan	100	107.500.000	100	0	100	102.015.900	13.89	31.133.620	25	16.678.265	61.11	75.974.290	100	95.804.020	100	95.804.020	100	187.858.020	100	184.15	DMAS		
0.00.01.2.01.03	Kelembagaan	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas, efisien, dan transparan	2	15.000.000	2	0	2	49.515.900	0	21.977.540	0	31.411.020	1	38.486.130	2	45.791.740	2	45.791.740	2	45.791.740	2	45.791.740	100	43.26	SEKRETARIAT OPUS
0.00.01.2.01.04	Kelembagaan	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas, efisien, dan transparan	18	52.100.000	18	0	18	52.990.000	5	9.176.080	9	25.287.945	13	37.488.140	18	50.012.240	18	50.012.240	18	58.012.240	100	58.012.240	100	58.012.240	SEKRETARIAT OPUS
0.00.01.2.02	Kelembagaan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan yang berkualitas, efisien, dan transparan	100	64.463.160.897	100	0	100	26.138.937.340	39.67	4.414.234.303	65.69	13.065.631.521	74.39	18.267.683.302	100	23.481.463.437	100	23.481.463.437	100	51.201.428.681	100	82.53	DMAS		
0.00.01.2.02.01	Kelembagaan	Pengendalian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2951	64.405.165.897	2951	0	2951	26.108.723.640	187	4.403.001.023	187	13.018.915.281	187	18.233.341.842	2554	23.432.728.157	2554	23.432.728.157	2554	51.201.428.681	100	51.201.428.681	100	51.201.428.681	DMAS
0.00.01.2.02.05	Kelembagaan	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan akurasi tahun SKPD dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan akurasi tahun SKPD	1	3.000.000	1	0	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	100	4.999.800	100	4.999.800	DMAS
0.00.01.2.02.07	Kelembagaan	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kelembagaan yang berkualitas, efisien, dan transparan	10	51.500.000	10	0	10	45.273.600	3	8.235.480	6	21.718.440	7	31.341.640	10	43.737.480	10	43.737.480	10	43.737.480	100	43.737.480	100	43.737.480	DMAS
0.00.01.2.03	Kelembagaan	Administrasi Barang Milik Daerah	Barang milik daerah yang berkualitas, efisien, dan transparan	100	670.000.000	100	0	100	200.044.000	0	0	0	49.749.250	0	96.538.500	100	199.077.000	100	199.077.000	100	629.180.458	100	93.91	DMAS		
0.00.01.2.03.02	Kelembagaan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengurusan barang milik daerah	2	670.000.000	2	0	2	200.044.000	0	0	0	49.749.250	0	96.538.500	100	199.077.000	100	199.077.000	100	629.180.458	100	93.91	DMAS		

No	Sumber	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Realisasi pada Tahun 2024 (Abstrak Program dan Rincian PK)	Realisasi Kinerja dan Target Kinerja (Tahun n-2) yang direvisi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Target Kinerja (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja dan Target Kinerja (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja dan Target Kinerja (Tahun n-1) yang direvisi		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran (Rasio) (Tahun 2023/24)	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran (Rasio) (Tahun 2023/24)	Unit Kerja Pemangku Anggaran (Jenis)		
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp				K	Rp
0.00.01.2.05.01	2	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	Sistem Akutik Perencanaan dan Penganggaran	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.05.02	1	Pengadaan Bahan Baku Beras Akibat Ketergeserannya	Jumlah Paket Pekerjaan Dinas Beras Akibat Ketergeserannya (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06	100	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	100	1.530.879.000	0	130.377.000	13.14	147.037.290	25.97	325.884.370	38.38	431.793.880	100	699.827.799	100	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.01	1	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan (Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah) (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	20.000.000	0	9.999.300	0	2.314.500	0	4.873.500	0	7.208.100	1	9.999.300	1	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.02	1	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan (Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah) (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.03	1	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan (Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah) (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	25.000.000	0	24.729.800	0	3.251.400	0	5.700.200	0	7.815.500	1	24.644.700	1	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.05	1	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan (Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah) (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	80.000.000	0	78.999.900	0	20.332.000	0	40.566.000	0	65.127.000	1	78.999.900	100	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.06	36	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Baku Baku dan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	36	96.139.000	0	95.740.000	9	23.940.000	18	47.886.000	27	71.820.000	36	95.740.000	36	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.07	1	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan (Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah) (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	339.720.000	0	331.241.800	0	39.247.000	0	80.980.200	0	118.860.500	1	331.241.800	100	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.08	12	Fasilitas Ruang Kerja	Jumlah Laporan Fasilitas Ruang Kerja (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	25.000.000	0	5.000.000	3	1.200.000	5	2.200.000	8	3.400.000	11	5.000.000	91.67	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.09	120	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan (Satuan: Laporan - Kumulatif)	120	325.000.000	0	296.601.000	42	49.988.000	89	127.544.250	107	126.794.250	107	298.515.000	107	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.06.10	12000	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12000	50.000.000	0	34.995.000	115	17.111.220	230	25.738.330	469	34.687.040	466	34.687.040	466	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.07	150	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	15.032.290.000	0	9.321.038.000	0	11.665.000	0	11.665.000	105	4.927.608.575	118	7.602.058.575	114	9.273.775.225	74	61.63
0.00.01.2.07.02	5	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	833.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.07.03	5	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	8.178.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.07.04	14	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	14	480.890.000	0	56.952.000	0	11.665.000	0	11.665.000	4	112.225.000	5	50.115.000	5	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.07.05	1	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARAT DAERAH		
0.00.01.2.08	100	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	100	530.000.000	0	676.348.928	14.63	122.224.773	50	245.784.796	75	395.364.793	100	631.084.897	100	232.18		
0.00.01.2.08.02	36	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	36	530.000.000	0	676.348.928	9	122.224.773	18	245.784.796	27	395.364.793	36	631.084.897	36	631.084.897	100	118.97
0.00.01.2.09	0.78	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	0.78	4.429.300.000	0	2.380.100.100	0	536.377.000	0	1.386.644.070	0	3.887.003.530	0.22	2.698.212.990	0	147.56		
0.00.01.2.09.01	178	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	178	399.792.000	0	787.843.500	438	187.248.000	873	372.970.000	1.305	542.208.000	1.735	744.446.000	1.735	744.446.000	914.72	94.28
0.00.01.2.09.02	165	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	165	107.508.000	0	692.256.600	29	358.129.000	81	37.604.000	143	47.336.000	154	63.307.900	154	63.307.900	93.23	39

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (Indikator) / Kegiatan / Output	Target Berbasis Program Tahun 2024 (Milyar Rupiah Realisasi PD)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Kinerja Pada Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja Realisasi s.d. Akhir Tahun 2024 (Milyar Rupiah Realisasi PD)	Realisasi Kinerja PD (Milyar Rupiah Realisasi PD s.d. Akhir Tahun 2022)				Realisasi Kinerja dan Kinerjanya Realisasi s.d. Akhir Tahun 2022 (Milyar Rupiah Realisasi PD s.d. Akhir Tahun 2022)				Rasio Kinerja dan Kinerjanya Realisasi s.d. Akhir Tahun 2022 (%)																																																																													
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																											
1.03.02.2.09.02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1.03.02.2.09.02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1.03.02.2.09.02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1.03.02.2.09.02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Evaluasi Kinerja SKPD - Tahun Anggaran 2023
simonek.cirebonkab.go.id

Halaman 3

No	Materi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Beres Tahun 2024 (Miliar Rp)			Realisasi Capaian Beres (Tahun 2023) (Miliar Rp)			Realisasi Capaian Beres (Tahun 2022) (Miliar Rp)			Target Capaian Beres (Tahun 2023) (Miliar Rp)			Realisasi Capaian Beres (Tahun 2022) (Miliar Rp)			Uraian Rincian Anggaran Biaya (UR-AB)	
				K		Sp	K		Sp	K		Sp	K		Sp	K		Sp		Bentuk Laporan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.03.02.2.02.03	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.03.02.2.02.08																				
1.03.02.2.02.09																				
1.03.02.2.02.15																				
1.03.02.2.02.21																				
1.03.02.2.02.28																				
1.03.03	7																			
1.03.03.2.01																				
1.03.03.2.01.01																				
1.03.03.2.01.04																				
1.03.03.2.01.06																				
1.03.04																				
1.03.04.2.01																				
1.03.04.2.01.03																				
1.03.04.2.01.03																				
1.03.04.2.01.03																				

No	Sarana	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Realisasi Perencanaan (RPJMD) Tahun 2024 (akhir tahun anggaran RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD yang ditargetkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD yang ditargetkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana RPJMD Tahun 2023 (%)		Unit Kerja Pelaksana	
				K	Rp	K	Rp	I	II	III		IV	K	Rp	K		Rp
				1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
1.03.08.2.01.02	Peningkatan Pemukiman, Perbaikan Sarana dan Prasarana (Kegiatan) dan Rehabilitasi Daurat Kebencanaan	Kegiatan Rehabilitasi Daurat Kebencanaan	Jumlah Daurat Kebencanaan yang direhabilitasi (Daurat Kebencanaan)	3	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.08.2.01.04								1	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.08.2.01.05	Kegiatan Rehabilitasi Daurat Kebencanaan	Kegiatan Rehabilitasi Daurat Kebencanaan	Jumlah Daurat Kebencanaan yang direhabilitasi (Daurat Kebencanaan)	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.08.2.01.12								10	500.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	100	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.09.2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	100	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.09.2.01.01								1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	60	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.10.2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	60	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.10.2.01.01								1	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	14	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.10.2.01.04								8	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	3,84	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.10.2.01.10								11,10	910.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	34,20	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.10.2.01.12								5,00	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Kilometer)	250	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BANGUNGAN DAN SARANAS
1.03.10.2.01.19								1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	

Evaluasi Kinerja SKPD - Tahun Anggaran 2023
 siaceek.cirebonkab.go.id

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Rencana Pelaksanaan (RPJMD) Tahun 2024 (Miliar Rupiah)			Realisasi Capaian (Rencana) Tahun 2023 (Miliar Rupiah)			Realisasi Kinerja Pada Semester						Realisasi Kinerja dan Anggaran Bersisa PD (Miliar Rupiah)			Target Capaian Kinerja dan Anggaran Bersisa PD (Miliar Rupiah)			Uraian Kegiatan dan Anggaran Bersisa PD (Miliar Rupiah)														
				K	Rp	Sp	K	Rp	Sp	I	II	III	IV	K	Rp	Sp	K	Rp	Sp	I	II		III													
1.03.11.2.01.18		Rehabilitasi jembatan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		50	2.000.000.000					0	0	0	513.264.000	0	0	0	402.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.11.2.01.19		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		3000	800.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.11.2.01.20		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		100	1.133.298.154					0	23.034.880	0	233.999.260	0	233.999.260	0	437.743.800	0	437.743.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.11.2.01.21		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		100	800.000.000					0	6.233.480	0	233.999.260	0	233.999.260	0	328.902.200	0	328.902.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.24		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		348	400.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.11.2.01.01		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		400	400.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.11.2.01.02		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		100	500.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.03		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		2	200.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.04		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		1	300.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.05		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		2	200.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.06		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		75	200.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.07		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		50	100.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.08		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		100	600.000.000					0	17.702.400	0	60.026.400	0	60.026.400	0	312.758.200	100	312.758.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.11.2.01.09		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		100	400.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.11.2.01.10		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		2	200.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.11.2.01.11		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		82-14	30.400.177.400					0	307.884.710	0	3.184.602.936	90,23	3.184.602.936	0	908.203.240	20,23	908.203.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.11.2.01.12		Pembangunan jalan-jalan	Peningkatan jumlah yang diluluskan (Garis Merah)		100	5.200.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Halaman 7

Evaluasi Kinerja SKPD - Tahun Anggaran 2023
sireonek - cirebonkab.go.id



PENGHARGAAN KEPADA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. CIREBON

**Pelaksanaan DAK Fisik Terbaik
Semester I Tahun 2022**

Cirebon, 21 Juli 2022
Kepala-KPPN Cirebon



Lili Khamiliyah, S.E., M.Si.
NIP. 196806151994032001





djp

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KPP PRATAMA CIREBON DUA

memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON

atas

**Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan sebagai Wujud Partisipasi
dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Cirebon, 7 Maret 2023
Kepala KPP Pratama Cirebon Dua



Ditandatangani secara elektronik
Abdon Budianto Situmorang

**TAX
GATHERING
2023**



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR KEP-81/KPN.1306/2023

Diberikan kepada :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON

PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
(DAK FISIK) TERBAIK
SEMESTER I TAHUN 2023

Cirebon, tanggal 14 Agustus 2023
Kepala KPPN Cirebon



Ditandatangani secara elektronik
Lili Khamiliyah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KPP PRATAMA CIREBON DUA

memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON

atas

Sinergi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II

Cirebon, 7 Maret 2023
Kepala KPP Pratama Cirebon Dua



Harry Gumelar